



**KETERKAITAN *SUNSET POLICY* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN  
DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh**

**Riyadi Fitra Nugroho  
B4B 008 229**

**PEMBIMBING :**

**H.Noor Rahardjo, SH.M.Hum.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

# **KETERKAITAN *SUNSET POLICY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :

**Riyadi Fitra Nugroho  
B4B 008 229**

**Dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 27 Mei 2010**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Pembimbing,**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro**

**H. Noor Rahardjo, SH.,M.Hum.**  
NIP. 19481212 197802 1 001

**H. Kashadi, SH.MH.**  
NIP. 19540624 198203 1 001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : **RIYADI FITRA NUGROHO** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. ***Tidak keberatan untuk dipublikasikan*** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 27 Mei 2010

Yang menerangkan,

**RIYADI FITRA NUGROHO**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa berkat rahmat dan hidayah- Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **KETERKAITAN *SUNSET POLICY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN DI KOTA SEMARANG**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro, Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.,Spd. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA., PhD. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan Tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., MS. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akademik;
6. Bapak Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Administrasi Dan Keuangan;
7. Bapak H. Noor Rahardjo, SH.,M.Hum selaku Pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah mencurahkan dan memberikan saran-saran terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
9. Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2008 terima kasih atas persahabatan;
10. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari Penulis yang masih terbatas, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, Penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan Penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pajak.

Semarang, 27 Mei 2010

Yang menerangkan,

RIYADI FITRA NUGROHO

## ABSTRAK

*Sunset Policy* 2008 adalah kebijakan Ditjen Pajak yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membetulkan pelaporan SPT tahunan atas pajak penghasilannya untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada dasarnya pelaksanaan *Sunset Policy* mengacu pada sistem *self assessment* di mana wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sudah selayaknya wajib pajak diberi kepercayaan dan kesempatan juga untuk membenahi pelaporan pajak penghasilannya. Dengan demikian, memasuki 2009, baik Ditjen Pajak maupun wajib pajak dapat melakukan *start* yang sama dalam membangun iklim perpajakan baru yang lebih kondusif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Keterkaitan kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang ternyata berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, jumlah pembayaran pajak, jumlah SPT yang disampaikan, kurangnya Surat Ketetapan Pajak. Namun demikian masih banyak WP juga yang belum mematuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, masih banyak juga dari mereka yang belum mengetahui peraturan-peraturan yang berhubungan pendaftaran sebagai WP, hal ini terbukti dengan masih banyaknya WP yang mendaftarkan dirinya karena “terpaksa”, takut diperiksa dan dikenai sanksi, walaupun kebanyakan dari mereka ternyata telah mengetahui resiko/sanksi apabila tidak mendaftarkan diri sebagai WP. dan membayar pajaknya dengan benar. Sedangkan upaya untuk menjaga meningkatkan kepatuhan tersebut adalah dengan cara : a) Pembenahan Administrasi *Pajak (Tax Administration)*; b) Perbaikan Pelayanan; c) Penyuluhan secara sistimatis dan berkesinambmigan kepada Wajib Pajak; dan Penegakan hukum. 2) faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang adalah : a) Ketidaktahuan WP akan hukumnya; b) Adanya kekurangsaadaran dan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya; c) WP tidak dapat diketemukan; d) Wajib Pajak tidak mau menerima petugas dengan alasan yang tidak jelas; e) WP ternyata telah terdaftar di KPP lain, walaupun mereka melakukan usaha di wilayah hukum KPP lama; f) Terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia .

*Kata Kunci : Sunset Policy, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan (PPh).*

## ABSTRACT

Sunset policy 2008 wisdom Ditjen tax that give to chance for taxpayer to repair reporting spt annual on the income tax to year tax 2007 and previous yrs. Basically execution sunset policy threaten in system self assessment where taxpayer given belief count, calculate, deposited, and report self tax magnitude debt appropriate taxation legislation rule. it is on the right track [to] taxpayer has been given belief and chance also to fix the income tax reporting. thereby, enter 2009, good also taxpayer can do start same in build new taxation climate more kondusif, transparent, and akuntable.

The aim from this research detects wisdom dependability sunset policy towards income taxpayer obedience (pph) at city semarang and factors that be obstacle in wisdom execution sunset policy in the hook with income taxpayer obedience (pph) at city semarang.

The research result that got: 1) wisdom dependability sunset policy towards income taxpayer obedience (pph) at city semarang obvious influential towards taxpayer obedience, this matter is proven by the increasing of taxpayer total, tax payment total, total spt that submitted, but such still many wp also not yet obey the duty to register self as taxpayer and carry out the taxation duty truly, still quite a few from them not yet detect that regulations enrollment as wp, this matter is proven by stills quantity wp that register self because "forced", afraid inspected and hitted sanction, although most of they obvious detect when not register self as wp. and pay the tax truly. Tax assessment under communication efforts to is watching over to increase obedience by: a) tax administration correction (tax administration); b) service repair; c) elucidation according to sistimaus and continual to taxpayer; and law enforcement. 2) factors that be obstacle in wisdom execution sunset policy in the hook with income taxpayer obedience (pph) at city semarang: a) ignorance wp the law; b) existence insensibly and taxpayer obedience on the taxation duty; c) taxpayer can't finding; d) taxpayer doesn't receptive operator with reason ill defined; e) taxpayer obvious registered at kpp other, although they do effort at territory of jurisdiction kpp long; f) the limited total and ability human resource.

*Keyword : Sunset Policy, taxpayer, income tax (pph).*



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian .....	14
1. Metode Pendekatan .....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	15
3. Sumber dan Jenis Data .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17

5. Teknik Analisis Data .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	20

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Pajak.....	22
1. Pengertian Pajak .....	22
2. Asas-Asas Pajak.....	24
3. Jenis-Jenis Pajak.....	29
B. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan (PPh) .....	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) ..	32
2. Subyek Pajak Penghasilan (PPh) .....	34
3. Obyek Pajak Penghasilan (PPh).....	36
C. Tinjauan Umum <i>Sunset Policy</i> .....	41

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Keterkaitan Kebijakan <i>Sunset Policy</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang.....	55
B. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan <i>Sunset Policy</i> dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang.....	97

## **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	126
B. Saran .....	130

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rencana dan realisasi penerimaan pajak dalam APBN.....	57
Tabel 2 : Pengetahuan WP terhadap peraturan mengenai pendaftaran pajak, hak dan kewajibannya .....	68
Tabel 3 : Pengetahuan WP tentang Kewajiban mendaftarkan dirinya sebagai WP .....	69
Tabel 4 : Alasan WP tidak segera/segera mendaftarkan dirinya sebagai WP.....	70
Tabel 5 : Tingkat Kepatuhan WP Terhadap Penyampaian SPT Tahun 2009	78
Tabel 6 : Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dari sebelum dengan setelah berlakunya <i>Sunset Policy</i> .....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Nasional sistem *self assessment* ini menganut prinsip ke- 3 dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Wajib pajak disini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP). Selain menghitung dan membayar sendiri wajib pajak juga harus melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayarkannya, sehingga diharapkan wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab yang besar, karena sistem ini sangat membutuhkan partisipasi yang besar dari wajib pajak diantaranya kesadaran, kejujuran serta tanggung jawab.

Pelaksanaan pemungutan pajak pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan, banyak kendala yang dihadapi oleh fiskus yang pada akhirnya akan berdampak pada pemberian sanksi kepada Wajib Pajak.

Direktorat Jendral Pajak pada pertengahan 2008 melalui berbagai media, mulai *booklet*, pamflet, baliho, radio sampai tayangan iklan di televisi, tentang adanya kebijakan *Sunset Policy* 2008. *Sunset Policy* 2008 adalah kebijakan Ditjen Pajak yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membetulkan pelaporan SPT tahunan atas pajak penghasilannya dengan ketentuan :<sup>1</sup>

1. Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang dalam tahun 2008 membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun 2006 dan sebelumnya yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar menjadi besar .

Wajib pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* 2008 diberi penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar sebesar 2 persen per bulan dari saat seharusnya terutang.<sup>2</sup> *Sunset Policy* menurut ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :

”kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga”.

Tahun pajak saat pembetulan SPT tahunan PPh dilakukan tidak lagi diperiksa oleh Ditjen Pajak. *Sunset Policy* 2008 diberikan terbatas sampai

---

<sup>1</sup> [www.beritapajak.go.id](http://www.beritapajak.go.id), akses internet tanggal 17 Nopember 2009

<sup>2</sup> *ibid*

dengan 31 Desember 2008. Kegiatan sosialisasi gencar dilakukan Ditjen Pajak, baik dengan pendekatan *person to person*, melalui surat imbauan maupun pendekatan per asosiasi pengusaha atau asosiasi profesi. Gema *Sunset Policy* juga terdengar di berbagai seminar yang diadakan di universitas. Namun, sampai saat ini masih sering terdengar keraguan wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan itu. Sebagian besar keraguan tersebut dipicu adanya kekhawatiran bahwa kebijakan itu tak lebih dari jebakan yang dirancang Ditjen Pajak untuk menjerat wajib pajak di kemudian hari. Apa yang sebenarnya menjadi esensi kebijakan ini? Mungkin sejenak perlu pemikiran yang sedikit mendalam dan objektif dengan memarkir sementara apriori dalam benak kita.

*Sunset Policy* 2008 dilandasi ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian, kebijakan ini sangat *legitimate* karena telah melalui proses diskusi cukup panjang dan persetujuan DPR. Pelaksanaannya pun dikawal dengan sejumlah peraturan menteri keuangan dan peraturan Dirjen pajak yang telah diterbitkan guna memberi kepastian bagi wajib pajak. Jelas sekali *Sunset Policy* 2008 ditempatkan pada posisi sangat strategis dan serius dilaksanakan oleh pemerintah.

Sebagaimana diberitakan, Ditjen Pajak yang saat ini melakukan upaya perbaikan manajemen pengelolaan pajak dan manajemen sumber daya

aparaturnya melalui modernisasi yang ditargetkan rampung pada akhir 2008 di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini sudah selayaknya wajib pajak diberi kepercayaan dan kesempatan juga untuk membenahi pelaporan pajak penghasilannya. Dengan demikian, memasuki 2009, baik Ditjen Pajak maupun wajib pajak dapat melakukan *start* yang sama dalam membangun iklim perpajakan baru yang lebih kondusif, transparan, dan akuntabel. Penafsiran beraneka ragam terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait kebijakan ini banyak bermunculan.

Pada dasarnya pelaksanaan *Sunset Policy* mengacu pada sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Karena itu, penentuan tahun pajak terkait pembetulan SPT tahunan PPh yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, termasuk di dalamnya kepercayaan mengungkapkan seluruh penghasilan, harta, dan kewajiban dalam SPT tahunan PPh-nya.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No 66/PMK.03/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A UU KUP pada Pasal 4 dan Pasal 8 terdapat jaminan bahwa data dan atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT tahunan PPh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang dibetulkan sehubungan dengan *Sunset*



*Policy* 2008 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.<sup>3</sup> Pada titik ini sangat terasa bahwa yang menjadi penekanan kebijakan ini adalah kelengkapan data dan keterbukaan wajib pajak. Atas dasar ini pula Ditjen Pajak tidak memeriksa lagi SPT tahunan yang telah dibetulkan karena wajib pajak dianggap sudah melaksanakan pemeriksaan mandiri dan menetapkan kekurangan pajak yang seharusnya terutang. Tentu saja dengan catatan bahwa pemeriksaan oleh Ditjen Pajak tidak dilakukan sepanjang tidak ditemukan data baru yang relevan dan material menyangkut wajib pajak. Dengan demikian, seberapa jauh wajib pajak mendapat jaminan bebas risiko pemeriksaan kembali kepada pilihan keterbukaan wajib pajak, *Full Disclosure* atau *Partial Disclosure Reporting*.<sup>4</sup>

Masih dalam kaitannya dengan *Sunset Policy* 2008, bebas dari risiko pemeriksaan pajak memang memiliki daya tarik yang lebih “menggoda” dibanding hanya tidak dikeluarkannya sanksi administrasi berupa bunga. Hal ini dikarenakan wajib pajak cenderung menghindari pemeriksaan. Ada ketakutan bakal terungkapnya penghasilan yang sebenarnya, sehingga mendapatkan penetapan pajak yang tinggi atau hanya takut pada efek kejutnya atau lebih ekstrem takut pada pemeriksa pajaknya. Hal ini wajar saja dan sangat manusiawi, terbebas dari risiko pemeriksaan atas pelaporan pajak di tahun-tahun lalu memberikan ketenangan batin dan ketenangan dalam melakukan aktivitas usaha. Namun, sebenarnya yang perlu dipertimbangkan

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

adalah *future benefit* yang diperoleh dari pengungkapan penuh atas penghasilan, harta, dan kewajiban yang dimiliki.

Pemilihan lokasi penelitian tesis ini dilakukan di Kota Semarang, didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Semarang adalah salah satu kota besar di Indonesia dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah yang cukup pesat tingkat perkembangan ekonominya dan memiliki potensi pajak baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga perlu diketahui kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang sebagai barometer kepatuhan wajib pajak di Jawa Tengah.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul: **“KETERKAITAN *SUNSET POLICY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN DI KOTA SEMARANG”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah keterkaitan kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui keterkaitan kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pajak mengenai pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan kebijakan *Sunset Policy*.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah pendapat P. J. A. Adriani yang mengatakan bahwa :<sup>5</sup>

“iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Selanjutnya menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah :

“iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, edisi ke 2 (Bandung : Enresco, 1988), halaman.15

<sup>6</sup> Ibid, halaman 18

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M., & Brock Horace R. Pajak adalah :<sup>7</sup>

“suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Rochmat Soemitro adalah :<sup>8</sup>

“suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan”.

Berdasarkan pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya

---

<sup>7</sup> Rochmat Soemitro. *Op. Cit.* halaman. 20

<sup>8</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, online internet tanggal 11 Januari 2010

kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.<sup>9</sup>

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak);
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan;
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak;
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / *regulative*);
6. Penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku untuk mentaati peraturan tersebut, dimana hal ini lebih bersifat represif. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk memengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya. Kalau arti yang terakhir ini dimasukkan sebagai bagian dari pengertian penegakan hukum, maka sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan pajak bagi masyarakat seharusnya menjadi hal yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum dalam arti luas di bidang pajak.

---

<sup>9</sup> *loc cit.*

<sup>10</sup> Erly Suandi, *Hukum Pajak*, edisi 4, cetakan 2, (Jakarta : Salemba Empat, 2008) halaman 11.

Pada tahun 1983 Pemerintah telah mengadakan pembaharuan perpajakan nasional atau yang sering disebut sebagai *tax reforms*.<sup>11</sup> Pembaharuan perpajakan nasional kala itu antara lain dipicu oleh adanya kesulitan dana pembangunan yang disebabkan turunnya harga minyak bumi di pasar dunia. Sejak pertengahan tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 harga minyak bumi di pasar dunia mengalami penurunan secara terus-menerus dan sangat drastis. Adanya penurunan harga minyak itu menyulitkan Indonesia, hal tersebut disebabkan karena sampai saat itu Indonesia masih mengandalkan penerimaan keuangannya dari sektor minyak dan gas.

Dampaknya antara lain pemerintah mengambil kebijakan untuk menyusun kembali skala prioritas dari proyek-proyek pembangunan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mencari sumber-sumber lain selain dari minyak dan gas bumi yang dipandang mampu untuk memberikan pemasukan keuangan negara, bahkan bila memungkinkan untuk menggantikan kedudukan minyak dan gas bumi yang sampai saat itu menjadi pemasukan utama. Pilihan tertuju kepada pajak.

Sunset policy adalah program penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan. Sunset policy merupakan fasilitas perpajakan yang diatur

---

<sup>11</sup> Istilah *Tax Reform* sering diartikan sebagai pembaharuan perpajakan. Akan tetapi secara teoritis menurut Rochmat Soemitro, tidak semua pembaharuan peraturan di bidang pajak itu dinamakan sebagai *tax reform*, karena *tax reform* adalah pembaharuan perpajakan yang mendasar yang mengenai falsafahnya, mengenai sistem penetapannya, mengenai sistem pemungutannya, mengenai sistem sanksinya, mengenai kepastian hukumnya, mengenai kemudahannya, dan seterusnya. Lebih jauh dapat dilihat dalam Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, (Bandung : PT. Eresco, 1988), halaman 15

berdasarkan Pasal 37A UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas kebijakan sunset policy adalah, pertama, Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Kedua, Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007 atau SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

*Sunset policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, dan sukarela melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak *to become the honest tax payer* melalui pengampunan pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) atas kewajiban perpajakannya, sebelum diterapkannya penegakan hukum (*law enforcement*) pajak. Oleh karena setelah sunset policy



berakhir, DJP akan melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan informasi yang telah dimiliki.

Peraturan perundangan dengan konsep *sunset policy* berlaku dalam periode waktu tertentu, setelah itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi. UU KUP memberikan fasilitas *sunset policy* berupa penghapusan sanksi administrasi dalam kurun waktu satu tahun. Pembatasan waktu ini harus dilakukan karena ada kemungkinan disalahgunakan. Apabila tidak diberikan batas waktu, justru dapat menyebabkan penurunan kepatuhan Wajib Pajak.

*Sunset policy* diharapkan mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk meningkatkan *voluntary compliance*. Kepatuhan Wajib Pajak sehubungan dengan *sunset policy* mencakup kepatuhan jangka pendek dan jangka panjang. Kepatuhan jangka pendek terkait dengan keterbukaan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar. Sedangkan kepatuhan jangka panjang menunjukkan bahwa Wajib Pajak taat terhadap peraturan tanpa harus dilakukan upaya penegakan hukum.

Dalam jangka panjang, peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak akan membawa dampak pada peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian perlu dikaji lebih lanjut, apakah permasalahan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dapat diterobos hanya dengan menerapkan *sunset policy*. Selain itu perlu ditelaah lebih lanjut apakah penerapan *sunset policy* dapat dijadikan sarana dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Kepatuhan sukarela dalam membayar pajak perlu diwujudkan antara lain dengan melakukan proses pemungutan pajak yang mudah, penggunaan atau alokasi penerimaan pajak yang transparan. Sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU dan peraturan yang terkait, kinerja aparat pajak, agar timbul kepercayaan dari Wajib Pajak.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>12</sup>

Dalam penulisan tesis penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu : suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,<sup>13</sup> dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 1

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 1992), halaman 52

menganalisis secara kuantitatif tentang keterkaitan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan keterkaitan kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang dan faktor-faktor yang menjadi dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009) halaman 6.

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview* dan penyebaran angket atau *questioner*.<sup>15</sup> Adapun data yang diperoleh dari responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pejabat/pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang;
- 2) Wajib Pajak di Kota Semarang sebanyak 10 (sepuluh).

b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui :

- 1) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988) halaman 10

orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* di Kota Semarang.

Sistem wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>16</sup>

- 2) Daftar pertanyaan, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan *Sunset Policy* di Kota Semarang, untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Dalam hal ini, daftar pertanyaan diberikan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang dan Wajib Pajak di wilayah Kota Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, meliputi :

---

<sup>16</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985). halaman 26

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
- a) Buku-buku mengenai perpajakan, buku tentang Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. Selain itu, dalam penulisan tesis ini juga digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - b) Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang pokok-pokok pikiran mengenai perpajakan.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>17</sup>

## **5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>18</sup> Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke

---

<sup>17</sup> Ibid halaman 52

<sup>18</sup> Ibid. halaman 10

dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematikan penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum pajak dan tinjauan umum pajak penghasilan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu keterkaitan kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang.

Bab IV Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

Pajak dari perspektif hukum menurut Rochmat Soemitro adalah: <sup>19</sup>

“merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan”.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M., & Brock Horace R. Pajak adalah :<sup>20</sup>

suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :

---

<sup>19</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, online internet tanggal 11 Januari 2010

<sup>20</sup> Rochmat Soemitro. *Op. Cit.* halaman. 20

*"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*

Berdasarkan berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

7. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
8. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak);
9. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan;
10. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak;
11. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulative);
12. Penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku untuk mentaati peraturan tersebut, dimana hal ini lebih bersifat represif. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk memengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya. Kalau arti yang terakhir ini dimasukkan sebagai bagian dari pengertian penegakan hukum, maka sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan pajak bagi

---

<sup>21</sup> Erly Suandi, *Op. Cit*, halaman 11.

masyarakat seharusnya menjadi hal yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum dalam arti luas di bidang pajak.

Melihat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memungut pajak hanya ada pada negara, dan pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga dalam hal ini apabila penyusunan Undang-Undang pajak tersebut dilakukan bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat dengan Pemerintah selaku Fiskus maka iuran yang dibayar oleh anggota masyarakat kepada negara berupa pajak merupakan kesepakatan seluruh warga negara.

## **2. Asas-Asas Umum Pajak**

Dalam pemungutan pajak terkait beberapa asas yakni asas yuridis, ekonomis dan financiaj.

### **a. Asas Yuridis.**

Menurut asas ini untuk menjamin bahwa pemungutan pajak mencerminkan suatu keadilan maka hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang nyata bagi Negara maupun bagi warganya, oleh karena itu maka pajak yang dipungut untuk kepentingan Negara harus berdasarkan Undang-undang. Di Indonesia landasan hukum pemungutan pajak untuk kepentingan negara adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

### **b. Asas Ekonomis**

Asas ekonomi lebih menekankan pada pemikiran bahwa Negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat, untuk itu maka pemungutan pajak diupayakan tidak akan menghambat kelancaran perkembangan ekonomi. Pertimbangan dari segi ekonomi juga akan selalu memperhitungkan apakah biaya untuk melakukan pemungutan pajak (*collection ratio*) relevan dengan jumlah penerimaan yang diharapkan.

- c. Asas finansial, dimana dalam kaitan ini fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi budgeter-nya yaitu fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara. Sehubungan dengan itu agar hasil pemungutan pajak besar maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya.

Lebih lanjut menurut Miyasto pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut: <sup>22</sup>

- a. Asas legal, berdasar asas ini setiap pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu setiap peraturan perpajakan, baik yang terdapat dalam peraturan Pemerintah, maupun peraturan yang lebih rendah tingkatannya harus ada referensinya dalam undang-undang. Dalam sistem perpajakan di Indonesia hal tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.”

---

<sup>22</sup> Miyasto Latar Belakang Perpajakan *Op. Cit.*

- b. Asas kepastian Hukum, menurut asas ini ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan dan kebingungan, tetapi harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak bersifat ambigu. Ketentuan-ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak.
- c. Asas efisien, dimana pajak yang dipungut dari masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biaya pemungutannya justru lebih besar dari hasil penerimaan pajaknya sendiri.
- d. Asas non distorsi, berdasar asas ini pajak yang dipungut harus tidak menimbulkan distorsi di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan dampak kelesuan ekonomi dan menghambat perkembangan ekonomi tetapi sebaliknya dapat memberikan stimulus terhadap perkembangan dunia usaha.
- e. Asas kesederhanaan, dalam hal ini yang dimaksud bahwa aturan-aturan perpajakan harus dibuat secara sederhana sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat wajib pajak, maupun oleh fiskus sebagai pihak-pihak yang terkait dengan perpajakan. Sederhana dalam sistem maupun tata caranya sehingga wajib pajak mudah dalam melaksanakan kewajiban maupun haknya. Aturan-aturan pajak yang rumit disamping akan

menyulitkan dalam pelaksanaan perpajakan juga akan menimbulkan celah hukum (loophopes) dan memudahkan terjadinya penghindaran pajak, disamping itu juga dapat menimbulkan keengganan bagi wajib pajak.

Asas dalam pembentukan peraturan dibidang perpajakan ini Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *Wealth of Nation* memberikan pedoman agar upaya peraturan pajak itu adil hendaknya dipenuhi empat syarat sebagai yaitu.”<sup>23</sup>

*Equality and equity* mengandung arti kesamaan dan keadilan dimana undang-undang pajak senantiasa memberikan perlakuan yang sama terhadap orang yang berada dalam keadaan yang sama atau obyek pajak yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Dari prinsip ini terkandung maksud adanya larangan terhadap perlakuan yang diskriminatif. Oleh Rochmat Sumitro istilah *equity* diterjemahkan sebagai kepatutan, sehingga prinsip ini secara bebas diterjemahkan sebagai keadilan dan kepatutan.

*Certainly* mengandung arti kepastian, oleh karenanya maka Undang-undang pajak yang baik harus dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak atau dengan kata lain pemungutan pajak harus didasarkan ketentuan yang jelas sehingga tidak boleh mengandung kemungkinan penafsiran ganda (*ambigius*).

---

<sup>23</sup> Adam Smith dalam Rochmat Sumitro, *Asas dan Dasar Perpajakan, Op. Cit*, halaman 15

*Convenience of payment.* Maksudnya bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib mempunyai saat *convenience* yang sama, yang mengenakan baginya untuk membayar. Karyawan, buruh, pegawai akan lebih mudah membayar pada saat menerima gaji, sedangkan petani akan mudah membayar pada saat masa panen.

*Economics of collection.* Maksudnya karena pemungutan pajak tujuan utamanya adalah mengisi kas negara maka biaya untuk melakukan pemungutan pajak tersebut hendaknya sekecil mungkin.

Keempat pedoman ini biasa disebut dengan “ The four canons of Adam Smith” atau juga disebut “ *The four maxime*

### **3. Jenis-Jenis Pajak**

Pembagian jenis-jenis pajak berikut ini hanya merupakan pembagian yang berhubungan erat dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai hal ini pembagian pajak yang sangat populer adalah yang didasarkan pada mekanisme pemungutannya atau pembagian berdasar golongannya atau pembagian dari siap pihak yang menanggung bebannya. Berdasarkan pembagian ini pajak dapat dibagi kedalam Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.<sup>24</sup>

Pajak Langsung dalam arti administratif adalah pajak yang dikenakan secara berulang-ulang, hanya pada waktu tertentu atau periodik setahun sekali), dimulai dengan pemberian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang harus diisi oleh wajib pajak, identitas objek pajak, tahun pajak,

---

<sup>24</sup> Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, halaman 66

besarnya pajak, dan saat jatuh tempo pembayarannya, dan sebagainya. Sedangkan Pajak Tidak Langsung dari segi administrasi baru terhutang jika telah terjadi suatu keadaan, adanya perbuatan dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, sehingga dengan demikian pembagian pajak kedalam pajak langsung dan pajak tidak langsung dapat bermanfaat untuk menentukan kapan saat timbulnya hutang pajak. Sedangkan yang termasuk dalam jenis Pajak Tidak Langsung antara lain: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Materai.

Selain pembagian jenis pajak kedalam Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung juga ada pembagian berdasarkan faktor yang dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak. Berdasarkan hal tersebut Prof. Adriani membedakan antara Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif.<sup>25</sup>

Pajak Subyektif adalah suatu pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subyektif subyek pajaknya, walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan obyek pajaknya. Dapat pula dirumuskan, Pajak Subyektif dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat obyektifnya. Dalam jenis pajak ini, keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Yang termasuk kelompok ini antara lain Pajak Penghasilan.

---

<sup>25</sup> Adriani dalam Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, halaman 67



Sedangkan yang dimaksud dengan pajak Obyektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan pertama-tama oleh obyek pajaknya. Keadaan subyektif subyek pajak tidak dipertimbangkan. Dengan rumusan lain Pajak Obyektif dimulai dengan obyeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lainnya, baru kemudian dicari siapa orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subyeknya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dan lain sebagainya.

Selain itu menurut kewenangan instansi yang menangani pemungutannya, pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada ditangan Pemerintah Pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn&PPn BM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan sebagainya, dan Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang wewenang pemungutannya berada di tangan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Propinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seperti Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran, dan sebagainya.

## **B. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan (PPH)**

## **1. Pengertian Dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)**

Pengertian pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak subyektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak.

Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Tahun pajak, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah tahun takwim yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak mengikuti tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Bagian tahun pajak adalah jangka waktu (hari/bulan) yang kurang dari 12 (dua belas) bulan saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Apabila tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim karena mengikuti tahun buku, tahun pajak ditentukan berdasarkan tahun yang memperoleh masa 6 bulan pertama kali. Misalnya PT A memilih tahun pajak sesuai

dengan tahun bukunya yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret. Dalam hal ini untuk periode 1 April 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 tahun pajak PT A termasuk dalam pajak 2008. Ini disebabkan pada tahun 2008, tahun buku meliputi lebih dari 6 bulan yaitu 9 bulan;

Landasan hukum Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang yang mengatur pajak Penghasilan di Indonesia adalah undang-undang No 7 Tahun 1983. Undang-undang tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Undang-undang No 7 Tahun 1991, kemudian Undang-undang No 10 tahun 1994, dan yang terakhir dengan Undang-undang No 17 Tahun 2000 berlaku efektif mulai 1 Januari 2001.

## **2. Subyek Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi;
2. Badan;
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subyek pajak pengganti, menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai

subyek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 1 UU No.17 tahun 2000, yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD. Dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan apensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya termasuk reksadana.

Subyek pajak menurut Pasal 2 ayat 2 (2) UU No.17 Tahun 2000, dibedakan antara subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Subyek pajak dalam negeri menjadi wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan subyek pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau dipeoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi kewajiban subyektif dan obyektif.

#### **Perbedaan antara**

**Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri adalah:**

No	Uraian	Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri Non-BUT
1	Penghasilan yang	Seluruh penghasilan	Penghasilan dari

	dikenakan pajak	baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia	sumber penghasilan di Indonesia
2	Dasar pengenaan pajak dan tarif	Penghasilan neto dengan tarif umum	Penghasilan bruto dengan tarif sepadan
3	Kewajiban SPT	Wajib menyampaikan SPT	Tidak wajib menyampaikan SPT

### 3. Obyek Pajak Penghasilan (PPh)

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
  - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
  - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Selanjutnya Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa:

- a. bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
- b. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
- c. penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
- d. penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, yang tidak termasuk Objek Pajak:

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :



- 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2) bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  - i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  - j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi; Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
  - k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura.

### **C. Tinjauan Umum *Sunset Policy***

Salah satu usaha pemerintah yang dalam hal itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, adalah dengan melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi lebih

menekankan pada proram meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Sedangkan intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak misalnya intensifikasi objek pajak di sektor-sektor tertentu, seperti konstruksi, properti, bubur kertas, perkebunan kelapa sawit dan sebagainya.

Kepatuhan sukarela dalam membayar pajak perlu diwujudkan antara lain dengan melakukan proses pemungutan pajak yang mudah, penggunaan atau alokasi penerimaan pajak yang transparan, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU dan peraturan yang terkait, kinerja aparat pajak, agar timbul kepercayaan dari Wajib Pajak.

*Sunset Policy* adalah merupakan suatu kebijaksanaan publik dari pemerintah yang diharapkan dapat diterima secara baik oleh masyarakat Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya.

Istilah kebijakan (*policy*) mempunyai beberapa macam pengertian. Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai “a *projected program of goals, values and practices*”<sup>26</sup>

Menurut Amara Raksasataya kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu : Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan

---

<sup>26</sup> Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power Adnd Society*, New Haven : Yale University Press, 1970, hal .71 sebagaimana dikutip oleh M. Irfan Islami, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), halaman 17

penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.<sup>27</sup>

Kebijakan dalam kaitannya dengan perpajakan (*tax policy*), adalah merupakan unsur yang pertama dari sistem perpajakan, sedangkan dua unsur lainnya adalah : Undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*).<sup>28</sup> Ketiga unsur tersebut saling kait mengkait dan terjadi menurut proses sesuai dengan urutan, sebagai sebuah kebijaksanaan pemerintah.

Sebagai kebijakan pemerintah maka sistim perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, yang ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut akan dilakukan. Kebijakan perpajakan merupakan sesuatu yang akan dituju, sedang Undang-undang perpajakan sebagai sarana untuk mencapai sarana tersebut, dan administrasi perpajakan merupakan sarana mengimplementasikan kebijakan perpajakan dalam bentuk Undang-undang.

Kebijakan perpajakan tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Undangundang. *Sunset Policy* adalah kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan, yang kemudian diimplementasikan dengan

---

<sup>27</sup> Bintoro Tjokroamijoyo, *Analisa Kebijaksanaan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional*, Majalah Administrator No. 5 & 6 Tahun IV, 1976, halaman 5

<sup>28</sup> Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 1994), halaman 37

Undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam Pasal 37 A Undang-undang tersebut dikatakan :

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Menurut Pasal tersebut Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas kebijakan *Sunset Policy* adalah : Pertama, Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun

2008 dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Kedua, Wajib Pajak Yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007 atau SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A UU. Nomor : 28 Tahun 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, pelaksanaan *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Konsep dasar Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau

dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.

2. *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada:
  - a. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya; dan
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
3. Mengingat fasilitas *Sunset Policy* berdasarkan sistem self assessment, maka penentuan Tahun Pajak terkait dengan SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan diserahkan kepada Wajib Pajak.
4. Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasa1 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *Sunset Policy* seperti ketentuan yang terkait dengan:

- a. pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan
  - b. persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
5. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*.

2. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*.
3. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan fasilitas *Sunset Policy*.



2. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas *Sunset Policy*.
3. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*

Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. KPP lokasi yang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak lokasi wajib memberitahukan ke KPP domisili dalam waktu paling lambat tanggal 22 Agustus 2008 atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SP3 diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
2. Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, dan

SPT untuk jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar, pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak tersebut dihentikan, kecuali:

- a. Jika Pajak Penghasilan WP Badan atau WP Orang Pribadi Yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dsb.) sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, maka pemeriksaan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung Kepala Unit Pelaksana pemeriksaan; atau
- b. Jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Temuan pemeriksaan tersebut hanya menyangkut temuan pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Dengan demikian, temuan pemeriksaan atas pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3. Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya tidak diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan tersebut dihentikan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi tidak sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya sedang diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan ditindaklanjuti sebagai berikut:
  - a. jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar (misalnya SPT Masa PPN lebih bayar), pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan tanpa dikaitkan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi.
  - b. Jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan tidak lebih bayar, pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tersebut dihentikan, kecuali:
    - 1) terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau
    - 2) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) terkait dengan pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya telah disampaikan kepada

Wajib Pajak, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan.

Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas masih ada ketentuan-ketentuan lainnya yang berkenaan dengan *Sunset Policy* ini, yaitu :

1. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-80/PJ/2008, Tanggal 30 Desember 2008, Tentang Penentuan Tanggal Terdaftar Wajib Pajak Sehubungan Dengan Akan Berakhirnya *Sunset Policy* Dan Berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008,
2. SE No.67/PJ/2008, Tanggal 2 Desember 2008, Tentang Pemanfaatan Data Atau Keterangan Yang berkaitan Dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Yang Disampaikan Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 37 A UU. No. 28 tahun 2007 Beserta Ketentun Pelaksanaannya
3. SE-66/PJ/2008 Tanggal 19 Nopember 2008, Tentang Pelayanan Kepada WP. Sehubungan dengan akan berakhirnya Program *Sunset Policy*,
4. SE-56/PJ/2008 Tangga1 23 September 2008 Tentang Kampanye *Sunset Policy*
5. SE-55/PJ/2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpajakan,
6. Surat Dirjen Pajak No.S-439/PJ/2008, Tanggal 9 Desember 2008, Tentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan *Sunset Policy*

7. Surat Dirjen Pajak No. S-162/PJ/2008, Tanggal 4 Juli 2008, Tentang Sasaran WP Dan Target Pertambahan Penerimaan Pajak Dan Jumlah WP. Orang Pribadi Program *Sunset Policy*
8. Peraturan Dirjen Pajak No.Per-301PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Nomor 27 Tentang tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian SPT Tahunan PPh. WP. Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya, Dan Sehubungan Dengan Pembetulan SPT Tahunan PPh. WP. Orang Pribadi Atau WP. Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 2007
9. Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-126/PJ/2008, Tanggal 31 Juli 2008, Tentang Pembentukan Tim *Sunset Policy*
10. Instruksi Dirjen Pajak Nomor Ins-2/PJ/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Ketentuan *Sunset Policy*
11. Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.03/2009, Tanggal 2 Februari 2009, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, Tentang Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan SPT, Dan Persyaratan WP. Yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37 A UU.No.28 Tahun 2007
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007, Tanggal 28 Desember 2007, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU. No.6 Tahun 1983 Tentang KUP

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU. No.28  
Tahun 2007

13.Perpu Nomor 5 Tahun 2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang  
Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang  
KUP.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Keterkaitan Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang**

Adanya pertumbuhan perekonomian yang berarti juga adanya pertumbuhan pendapatan ini, maka seharusnya menambah juga kewajiban untuk menjadi Wajib Pajak, karena kewajiban perpajakan pada hakekatnya merupakan kewajiban kenegaraan bagi masyarakat dalam kerangka pemikiran tentang keikutsertaan atau peran serta rakyat dalam pembeayaan negara maupun pembangunan nasional.

Kemandirian suatu negara dapat dilihat dari sumber-sumber penerimaan baik untuk pembiayaan pemerintah maupun untuk pembangunan. Sebagaimana terlihat pada APBN, sumber penerimaan negara pada dasarnya terbagi menjadi dua sumber utama, yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Semakin besar pinjaman luar negeri maka dapat dikatakan semakin tidak mandiri pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di negara dimaksud. Ketidakmandirian selanjutnya dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan.

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan <sup>55</sup> dan penerimaan bukan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud

kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Pajak yang secara historis sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan suatu bangsa,<sup>29</sup> sekarang ini mempunyai peran yang sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) , hal ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan dalam negeri lainnya<sup>30</sup>. Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena ia bersifat kenyal atau fleksibel, lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak.<sup>31</sup>

Mengingat sifatnya yang demikian itu maka pajak sebagai sumber utama penerima negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini dapat dilihat pada APBN yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, baik dari segi rencana maupun realisasi penerimaannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel : 1 :**  
**Rencana dan realisasi penerimaan pajak dalam APBN.**

---

<sup>29</sup> Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan*, Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), halaman 2

<sup>30</sup> Adinur Prasetyo, Menuju APBN Mandiri, *Berita Pajak* Nomor 1524/Tahun XXXVII/1 Oktober, 2004; halaman 44

<sup>31</sup> Hadi Poernomo, Strategi & Prklarsa Regulasi Perpajakan Nasional Dalam Menopang Omalisasi Penerimaan Negara, *Berita Pajak* Nomor 1465/Tahun XXXIV/15 Apri1 2002, halaman 30



Tahun	Rencana	Realisasi	%
2004	238.500 Triliun	204.153 Triliun <sup>32</sup>	100,12
2005	302.200 Triliun	238.800 Triliun <sup>33</sup>	100,6
2006	371.000 Triliun	304.300 Triliun <sup>34</sup>	96,5
2007	432.500 Triliun	358.000 Triliun <sup>35</sup>	98,55
2008	480.900 Triliun	426.230 Triliun <sup>36</sup>	102,12
2009	528.000 Triliun	515.380 Triliun <sup>37</sup>	97,61

*Sumber Data : Diolah dari Data Sekunder*

Apabila kita melihat jumlah rencana dan penerimaan pajak sebagaimana dalam tabel 1 tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak yang selalu meningkat di setiap tahunnya mempunyai peran yang sangat dominan dalam pembangunan di negeri ini.

Adanya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan pada setiap tahunnya tentu harus dibarengi dengan adanya peningkatan kesadaran/kepatuhan masyarakat di bidang permakan dan harus pula ditunjang dengan iklun yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam salah satu butir dari penjelasan umum UU. Nomor 28 tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Atas UU. Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa kewajiban

---

<sup>32</sup> *Harian Jawa Pos*, 6 Desember, 2004, halaman 4

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> *Majalah Berita Pajak*, Nomor 1555, Tahun XXXVIII, 15 Januari 2006, halaman 16

<sup>35</sup> Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Keuangan 2008, halaman 41

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembeayaan negara dari pembangunan nasional, karena pada prinsipnya semua rakyat mempunyai hak untuk berperan serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan, oleh karena itu pemerataan beban pajak ke seluruh lapisan masyarakat merupakan hal yang esensial.

Sesuai dengan prinsip pemajakan, pemerataan tersebut lazimnya dikaitkan dengan kemampuan (daya pikul "*ability to pay*") dari setiap anggota masyarakat. Daya pikul tersebut umumnya diukur dari penghasilan atau pengeluaran tiap orang.<sup>38</sup>

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang telah dimulai sejak tahun 1984, seberapa banyak tiap warga masyarakat harus berpartisipasi dalam pembeayaan negara dan pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak, dihitung (*assess*) sendiri oleh tiap anggota masyarakat, karena secara faktual mereka adalah yang tahu persis seberapa banyak jumlah penghasilannya, maka seberapa banyak pajak yang harus dibayar setiap tahunnya ditetapkan sendiri dengan melalui instrument Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan Pasal 4 (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.27/PJ.1995, Tanggal 23 Maret 1995, "Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak", seharusnya seseorang yang di dalam setahunnya telah mempunyai/memperoleh penghasilan yang

---

<sup>38</sup> Gunadi, *Pajak Dan Aplikasi Undang-undang Penagihan Pajak Sebagai Upaya Pengamanan*, Berita Pajak 1997, halaman 36

jumlahnya melebihi besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka ia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan dalam ayat 2 (dua) nya disebutkan bahwa untuk Wajib Pajak Badan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. selambat lambatnya satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Menurut Pasal 7 UU PPh Tahun 2008 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) adalah :

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak:

Penghitungan besarnya jamlah pajak (*assessment system*) sesuai dengan ketentuan tersebut pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh anggota masyarakat (*self assessment*), sedang pelunasan jumlah dimaksud (*payment system*) dapat dilakukan oleh mereka sendiri (*self payment-installment system*) atau melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga (*withholding system*)<sup>39</sup>.

Pengertian *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terhutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus.<sup>40</sup> Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi nelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dalam sistem *Self Assessment* yang berarti suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang, sebagian besar prakarsa dan kegiatan perpajakan berada di tangan Wajib Pajak.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka diminta untuk mendaftarkan diri (bagi yang telah mencapai titik nisbah-*threshold*-

---

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Loc.cit*, halaman 20

perpajakan) sebagai Wajib Pajak (untuk diberikan NPWP), mendapatkan dan mengisi surat pemberitahuan (tahunan dan masa), menghitung jumlah pajak yang terhutang (berdasarkan obyek yang selengkapnya dan sebenarnya), memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri maupun dipungut/dipotong oleh pihak lain, membayar kekurangannya (kalau ada), dan melaporkan pelaksanaan kewajiban tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam sistem ini sebenarnya ada dua fasilitas utama yang diberikan kepada Wajib Pajak yang kurang difahami dan dirasakannya. Kedua fasilitas tersebut adalah:<sup>41</sup>

1. Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
2. Pemberian tempat yang terhormat sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kenegaraan bagi mereka yang melaksanakan kewajiban pajaknya.

Adapun ciri-ciri dari system pemungutan pajak berdasarkan *Self Assessment* adalah : <sup>42</sup>

1. Adanya kepastian hukum;
2. Perhitungannya sederhana dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak;
3. Pelaksanaannya mudah;
4. Lebih mencerminkan rasa keadilan dan merata;

---

<sup>41</sup> Salamun, AT. *Pajak, Citra dan Upaya Pembaharaunnya, Revisi Hukum Pajak, Citra dan Bebannya*, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 1993) halaman 185

<sup>42</sup> Indra Ismawan, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, (Jakarta : Alex Media Komputindo, 2001), halaman 11

5. Memperkecil kemungkinan Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak akibat perhitungan yang terlampau besar.

Dengan adanya sistem ini, dalam diri WP. diharapkan tumbuh adanya:<sup>43</sup>

1. *Tax Consciousness* (Kesadaran/Kepatuhan)
2. Kejujuran;
3. *Tax Mindedness*/hasrat untuk membayar pajak;
4. *Tax Discipline*, yaitu disiplin Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak sehingga pada waktunya Wajib Pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang, seperti memasukkan SPT. pada waktunya, membayar pajak tanpa diperingatkan.

Sebenarnya pemberian kewenangan dan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan sendiri pajaknya tersebut adalah untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan peran serta mereka dalam kegiatan pembangunan yang memberi konsekwensi kepada Wajib Pajak untuk mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajak, seperti kapan harus dibayar, kepada siapa pajak harus dibayarkan dan sanksi apa yang dijatuhkan jika ada salah perhitungan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan pajak.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Rochmat Rochmat, *Asas Dan dan Perpajakan 2*, (Bandung : Refika Aditama, Bandung, 1998), halaman 14

<sup>44</sup> Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), halaman 5

Pembayaran jumlah dimaksud sebagian dapat dilakukan secara berkala maupun insidentil (*pay-as-you-go*) dan sebagian lagi melalui pungutan dan potongan oleh pihak ketiga (*pay-as-you-earn*). Pada akhir tahun dilakukan perhitungan kembali antara jumlah yang senyatanya harus dibayar dengan jumlah yang telah dibayar sendiri dan dipungut/dipotong pihak ketiga. Hasil dari perhitungan tersebut dapat berupa kekurangan atau kelebihan bayar. Dalam sistem ini idealnya adalah bahwa apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka kekurangan tersebut harus segera dilunasi tepat pada waktunya, apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan (restitusi) oleh administrasi pajak dengan cepat, tepat, murah dan mudah. Dengan adanya sistem *self assessment* ini diharapkan kepatuhan yang ada dalam masyarakat baik dalam mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak maupun dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan kepatuhan yang sukarela (*voluntary compliance*)

Sebenarnya apabila Wajib Pajak melaksanakan ketentuan *Self Assessment* ini secara sukarela dan konsekwen, yaitu mendaftarkan dirinya sebagai WP., dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (benar dan lengkap), maka dikemudian hari tidak akan ada Pemeriksaan yang menghasilkan pemberian NPWP. secara jabatan atau Surat Ketetapan Pajak (Kurang Bayar), bahkan penyidikan kepada WP.

Untuk menunjang penerapan sistem *self assessment* tersebut, khususnya untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) diberi wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem dimaksud. Tindakan pengawasan tersebut pada dasarnya meliputi : kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Terhadap mereka yang tidak/belum menjalankan atau mematuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak ini kemudian dapat diberikan NPWP. secara jabatan (diberikan berdasarkan pemeriksaan fiskus, bukan atas permintaan WP) dan atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP), bahkan dapat juga dilakukan penyidikan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada dasarnya adalah merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri, atau identitas Wajib Pajak, di samping itu NPWP. juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, oleh karena itu NPWP. merupakan “pintu gerbang” antara aparat pajak dan Wajib Pajak. Sedangkan Surat Ketetapan Pajak pada dasarnya. adalah merupakan surat yang berisi jumlah



utang pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak.

Dari jumlah SKP. yang telah dikeluarkan sebagian telah dilunasi oleh WP. sebelum atau tepat pada waktunya, sedang sebagian lainnya sampai dengan tanggal jatuh temponya tidak dilunasi oleh WP, sehingga menjadi tunggakan pajak yang jumlahnya dari tahun ketahun semakin meningkat.<sup>45</sup>

Apabila dilihat data jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar (yang relatif masih sedikit), maupun jumlah SKP. yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak yang kemudian dapat menimbulkan tunggakan pajak bila tidak dilunasi (yang setiap tahunnya cenderung naik), maka dapat dikatakan bahwa pemberian kewenangan dan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada Wajib Pajak melalui sistem *self assessment* belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, atau dapat dikatakan pula bahwa kepatuhan Wajib Pajak sebenarnya juga belum sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP. sangat perlu untuk mendapatkan perhatian.

Untuk mengetahui tentang kepatuhan Wajib Pajak, utamanya dalam mendaftarkan dirinya sebagai WP, membayar pajaknya dengan benar, serta melaporkannya dengan tepat waktu, maka tingkat kepatuhan hukum tersebut dapat dijabarkan melalui indikator-indikator yang ditetapkan, yaitu <sup>46</sup> :

---

<sup>45</sup> Gunadi, *Tinjauan Aspek Keadilan Dalam Penagihan Pajak, Berita Pajak 1357*, halaman 40

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*, hal. 239

1. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*);
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*);
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan
4. Pola-pola perilaku kelakuan hukum (*legal behavior*).

Setiap indikator tersebut menunjukkan pada tingkat kepatuhan tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pada mulanya masalah kepatuhan hukum tersebut timbul dalam proses penerapan hukum positif tertulis. Dalam kerangka proses tersebut timbul masalah oleh karena adanya ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kenyataan dipatuhinya atau tidak dipatuhinya hukum positif tertulis. Hukum menghendaki adanya keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif.

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap UU. No.28/2007, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dilihat dari jenis Wajib Pajak (WP Badan dan WP Perseorangan) dengan jumlah responden 10 WP Badan dan 10 WP Perseorangan.

**Tabel 2 :**  
**Pengetahuan WP terhadap peraturan mengenai pendaftaran pajak, hak dan kewajibannya**

NO.	JENIS WP.	JAWABAN	
		TAHU	TIDAK
1.	WP. PERSEORANGAN	8	2

2.	WP.BADAN	10	0
----	----------	----	---

*Sumber : Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada WP*

Berdasarkan data kuantitatif tersebut ternyata dari 10 responden WP. Perseorangan (75 %) menjawab tahu, sedang sisanya sebanyak 2 WP. (25 %) menjawab tidak tahu. Untuk 10 responden WP Badan 10 (100%) menjawab tahu. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai pengetahuan Wajib Pajak terhadap isi UU. No.28/2007 dan peraturan pelaksanaanya, yaitu mengenai sampai batas berapakah PTKP/penghasilan, yang mengharuskan seseorang/badan mendaftarkan diri sebagai WP, Pertanyaan ini diajukan untuk mendeskripsikan apakah WP. telah mengetahui hak (salah satu halnya) dan kewajibannya dalam mendaftarkan diri sebagai WP dan membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

**Tabel 3 :**  
**Pengetahuan WP tentang Kewajiban mendaftarkan dirinya sebagai WP**

NO.	JENIS WP	JAWABAN	
		TAHU	TIDAK
1.	WP/PP. PERSEORANGAN	9	1
2.	WP/PP.BADAN	8	2

*Sumber : Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada WP.*

Dari jawaban Wajib Pajak dapat diketahui bahwa 9 WP Perseorangan (90 %) dan 8 WP Badan (80 %) menjawab tahu, sedangkan sisanya sejumlah 1 (10%) WP Perseorangan dan 2 (20 %) WP Badan menjawab tidak tahu.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai alasan mengapa WP. tidak segera/tidak segera mendaftarkan dirinya, sebagai WP, padahal telah memenuhi syarat. Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab mengapa mereka segera/tidak segera mendaftarkan dirinya sebagai WP. padahal telah memenuhi syarat, serta sampai sejauh mana pengaruh sanksi paksaan yang akan diterapkan kepada mereka apabila tidak mendaftarkan diri.

**Tabel 4 :**  
**Alasan WP tidak segera/segera mendaftarkan dirinya sebagai WP**

NO	JENIS WP			
		a (keharusan)	b (terpaksa)	c (takut diperiksa)
1	WP.PERSEORANGAN	8	-	2
2	WP.BADAN	9	-	1

*Sumber : Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada WP.*

Terhadap pertanyaan tersebut di atas, semua WP. OP ( 80 % ) dan WP. Badan (90 %) mendaftarkan diri sebagai WP. karena memang sudah

seharusnya mendaftarkan diri karena memang telah memenuhi syarat, sedang 20 % WP. OP dan 10 % WP. Badan menjawab bahwa mereka mendaftarkan dirinya sebagai WP. karena karena takut diperiksa.

Secara kuantitatif harus diupayakan agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah, sedangkan secara kualitatif harus diarahkan untuk melakukan kontrol terhadap jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar (mempunyai NPWP), apakah penghasilan yang dilaporkan merupakan penghasilan yang “sesungguhnya”, mengingat jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar adalah termasuk juga Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)-nya nihil.

Terobosan untuk menggali potensi perpajakan tersebut di antaranya adalah dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Sebagai upaya untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut secara optimal, Pasal 35 Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Pasal 35 KUP :

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

- (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).”

Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap institusi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain atau dapat diartikan bahwa semua pihak di Wilayah Republik Indonesia Wajib untuk memberikan data apabila diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ke depan Direktorat Jenderal Pajak akan meminta data ke semua instansi. Apabila kewajiban memberikan data tidak dipenuhi maka ada ancaman yang berupa sanksi pidana yang dijelaskan di Pasal 41c Undang-undang KUP. Adapun bunyi Pasal 41c Undang-undang KUP tersebut adalah :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiali).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh)

bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak sehagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Sebagai implementasi dari Pasal 35A Undang-undang KUP. tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah membentuk sebuah unit setingkat eselon II yang disebut Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, di samping itu di masing-masing Kantor Wilayah juga terdapat Bidang Dukungan Teknis Dan Rekonsiliasi, yang keduanya mempunyai tugas di antaranya adalah memproses pengolahan data, sehingga akan terintegrasi di unit ini, semua SPT dan data-data dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain akan masuk dan diolah untuk dapat diteliti dan disandingkan sehingga akan terbentuk suatu data yang akurat yang menyangkut Wajib Pajak.

Kondisi tersebut di atas tentu memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah

dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan diri dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, maka Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan atau membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun-Tahun Pajak yang lalu.

Kesempatan tersebut di antaranya adalah dengan mengikuti kebijaksanaan *Sunset Policy*, yaitu suatu kebijaksanaan Pemerintah yang memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Kebijakan *Sunset Policy* adalah bukan merupakan bentuk “Pengampunan Pajak” (*Tax Amnesty*). Dalam Pengampunan Pajak jaminan dan kepastiannya memang lebih tinggi karena Wajib Pajak sudah pasti tidak akan diperiksa. Sementara itu, *Sunset Policy* hanya memberikan penghapusan sanksi pajak jika Wajib Pajak memperbaiki surat pemberitahuan tertulisnya.<sup>47</sup>

Dalam kaitannya dengan Pengampunan Pajak ini, sebenarnya Pemerintah telah merencanakannya sejak tahun 2001 dengan menyusun draft Rencana Undang-undang Pengampunan Pajak, namun sampai dengan tahun 2005 draft tersebut belum juga terealisasi. Tidak terealisasinya draft

---

<sup>47</sup> Harian Tempo, 28 Juli 2008



tersebut karena banyaknya kekuatan politik yang turut berperan. Salah satu penyebab draft tersebut tidak disepakati adalah DJP sebagai otoritas pajak membuat kebijakan di luar koridor kapabilitasnya.<sup>48</sup> Pengampunan di dalam draft tersebut tidak hanya terkait dengan sanksi administrasi dan tindak pidana pajak, melainkan juga tindak pidana lain, yang bukan wewenang DJP. Oleh karena pembuatan UU Pengampunan Pajak tidak dapat terealisasi, maka dicari jalan lain untuk mengakomodir pengampunan pajak. Dalam UU KUP dibuat Pasal yang mengakomodir ketentuan pengampunan pajak, yang berbentuk pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi WP yang membetulkan SPT dan mendaftarkan diri. Rancangan tersebut akhirnya selesai pada tahun 2007 dan diimplementasikan tahun 2008., yaitu berupa *Sunset Policy*.<sup>49</sup> Pada dasarnya yang dapat memanfaatkan *Sunset Policy* adalah :

- a. Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dengan sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009.

Di samping itu, untuk memperoleh fasilitas *Sunset Policy* orang pribadi tersebut harus:

---

<sup>48</sup> Muhammad Na'im Amali, *Mencermati Perumusan Masalah Kebijakan Sunset Policy*, 2008, halaman 1

<sup>49</sup> Ibid.

- Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, Penuntutan atau Pemeriksaan di Pengadilan atas Tindak Pidana di bidang perpajakan;
- Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar dan kemudian menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 yang membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya dalam tahun 2008 yang menimbulkan tambahan pembayaran pajak.

Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau Badan tahun pajak 2006 dan atau sebelumnya yang belum disampaikan atau baru disampaikan pada tahun 2008 ini, dianggap sebagai pembetulan SPT. Untuk memperoleh fasilitas *Sunset Policy*, terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang dibetulkan tersebut harus:

- Belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak;
- Belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- Telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan; tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti

Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan Sebelum pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan harus melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan.

Lingkup penyampaian SPT Tahunan PPh WP.OP dalam kaitannya dengan *Sunset Policy* ini meliputi penyampaian SPT Tahunan PPh yang terkait dengan pembayaran:

- a. PPh Pasal 29;
- b. PPh Pasal 4 ayat (1); dan/atau
- c. PPh Pasal 15

Penagihan tunggakan pajak WP besar di Kota Semarang yang nilainya sudah mencapai Rp 193,69 miliar, tunggakan tersebut berasal dari sekitar 30% WP yang tercatat sebanyak 1.000 orang, tetapi 84,96% sebesar Rp 164,55 miliar berasal dari 10 WP. Penagihan secara represif seperti pemblokiran, penyitaan dan pelelangan aset, tetapi sudah lebih dulu lewat proses persuasif dengan pendekatan terhadap WP. Tiga sektor dominan yang menopang penerimaan pajak di KPP Madya Semarang, dia menambahkan meliputi sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa keuangan.<sup>50</sup> Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

---

<sup>50</sup> Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang Haryo Abduh Suryo Negoro, Sumber: <http://web.bisnis.com/keuangan/ekonomi-makro/1id143945.html>

**Tabel 5**  
**Tingkat Kepatuhan WP Terhadap Penyampaian SPT Tahun 2009**

Jenis	Target	Realisasi
SPT Tahunan Badan	100%	94,99%
SPT Tahunan Perorangan	100%	96,42%
jumlah	Rp. 2,8 triliun	Rp. 2,16 triliun

*Sumber Data : Diolah Dari Data Sekunder*

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dilapangan, diperoleh data yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak dari sebelum berlakunya *Sunset Policy* dengan setelah berlakunya *Sunset Policy*. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

**Tabel 6 :**  
**Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dari sebelum dengan setelah berlakunya *Sunset Policy***

Jenis WP	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
BADAN	4.225	4.638	5.163	5.685
PERORANGAN	8.427	13.941	30.231	45.987
Jumlah	12.652	18.579	35.394	51672

*Sumber Data : Diolah Dari Data Sekunder*

Berdasarkan hasil penelitian, untuk rencana penerimaan tahun 2008 : 390.972.000 dan terealisasi 418.802.000. sedangkan untuk tahun 2009 464.519.000 dengan realisasi 512.101.000. Jumlah ketetapan selama WP ikut *Sunset Policy* tidak boleh diperiksa, sehingga yang boleh diperiksa adalah

<sup>51</sup> Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang Haryo Abduh Suryo Negoro, Sumber: <http://web.bisnis.com/keuangan/ekonomi-makro/1id143945.html>

tahun 2007 dan 2008 sudah diusulkan untuk diperiksa tetapi belum selesai, kecuali ketetapan SPT lebih bayar.<sup>52</sup>

Selanjutnya untuk laporan WP *Sunset Policy* pembetulan SPT WP terdaftar tahun 1998 s/d 2006 sebanyak 1.700 dengan jumlah total Rp. 2.182.000.000 (jumlah sanksi penghapusan Rp. 1.986.000.000,-). Sedangkan untuk WP yang terdaftar diawal *Sunset Policy* terdaftar 2008 ada 50 WP dengan jumlah pembayaran Rp. 57.300.000,- dengan sanksi penghapusan Rp. 35.600.000,-. Jumlah total pembetulan SPT *Sunset Policy* jumlah WP 1.758 dengan jumlah pembayaran Rp. 2.239.531.000,- dan jumlah sanksi yang dihapus Rp. 2.021.998.000,-.<sup>53</sup>

Mengingat fasilitas *Sunset Policy* didasarkan pada sistem *self assessment*, maka penentuan tahun pajak terkait dengan SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat

---

<sup>52</sup> Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang Haryo Abduh Suryo Negoro, Sumber: <http://web.bisnis.com/keuangan/ekonomi-makro/1id143945.html>

<sup>53</sup> Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang Haryo Abduh Suryo Negoro, Sumber: <http://web.bisnis.com/keuangan/ekonomi-makro/1id143945.html>

digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan oleh *fiscus*. Adapun tujuan diadakannya *Sunset Policy* ini adalah :

1. Membangun basis data yang akurat
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
3. Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak
4. Meningkatkan jumlah pembayaran pajak

Sedangkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak apabila memanfaatkan *Sunset Policy* antara lain adalah :

1. Sanksi Pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak masa lalu yang baru dibayar dalam periode *Sunset Policy* dihapuskan dengan cara tidak ditagih.
2. Data dan informasi yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPT atau pembetulan SPT Tahunan PPh sehubungan dengan pemanfaatan *Sunset Policy*, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, kecuali apabila ditemukan data konkrit yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tersebut tidak benar.
3. Apabila Wajib Pajak sedang diperiksa dan pemeriksa belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak, pemeriksaan tersebut dihentikan.
4. Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT atau pembetulan SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan *Sunset Policy* tidak dapat

digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (Skp) atas jenis pajak lainnya.

Di samping itu, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP memperoleh juga manfaat berupa:

1. Terhindar dari pemotongan pajak yang lebih tinggi dari tarif yang seharusnya pada tahun 2009 dan selanjutnya, yakni untuk PPh Pasal 21 dipotong 20% lebih tinggi dari tarif umum dan untuk pemotongan PPh Pasal 22 atau Pasal 23 dipotong 100% lebih tinggi dari tarif umum.
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan berangkat ke luar negeri, mulai tahun 2009 dibebaskan dari membayar Fiskal Luar Negeri.

Untuk pemeriksaan pajak :

1. Wajib Pajak yang sedang diperiksa, apabila memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* pemeriksaannya dapat dihentikan termasuk terhadap jenis pajak lainnya, sepanjang jenis pajak lainnya tersebut tidak menyatakan lebih bayar.
2. Pemeriksaan tidak dihentikan apabila:
  - Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan;
  - Terdapat indikasi pidana.

- Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar kemudian memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*, maka SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar tersebut dianggap dicabut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya kebijaksanaan *Sunset Policy* banyak memberikan keuntungan baik bagi Pemerintah maupun Wajib Pajak itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa *Sunset Policy* adalah merupakan suatu bentuk kebijakan baru yang juga menjadi peristiwa besar dalam sejarah perpajakan di Indonesia, oleh karena itu agar ketentuan Undang-undang itu dapat berfungsi dan diterima dengan baik oleh masyarakat, maka perlu diberikan metode dan strategi yang akurat dalam penyampaianya.

Apabila kita berbicara mengenai berfungsinya hukum dan penegakannya dalam masyarakat, khususnya terhadap UU. NO. 28/2007 dan aturan pelaksanaannya, maka pikiran kita diarahkan pada kenyataan apakah Undang-undang dan aturan-aturan tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Masalah tersebut kelihatannya sederhana, padahal di balik kesederhanaan tersebut ada beberapa hal yang cukup rumit.

Dalam teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal tentang berlakunya hukum sebagai kaidah.<sup>54</sup> Berlakunya kaidah dalam

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta ; Bina Cipta, 1983), halaman 29



bahasa Belanda disebut “*gelding*” atau “*geltung*” dalam bahasa Jerman. Mengenai hal tersebut ada anggapan sebagai berikut <sup>55</sup> :

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya di dasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W.Zevenbergen) atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (JHA.Logeman);
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
3. Kaidah hukum itu berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi;

Apabila dibuat perbandingan antara WP. Perseorangan dan Badan, ternyata WP. Perseorangan lebih mengetahui peraturan, hak-hak dan akibat hukumnya apabila mereka tidak mendaftarkan diri dan membayar pajaknya dengan benar, karena sebagian besar dari mereka menguasai sendiri kewajiban perpajakannya, sedang untuk WP. badan sebagian besar dari mereka pengelolaan pajaknya diserahkan kepada Konsultan Pajak.

Adalah sangat penting untuk diupayakan agar kewajiban tersebut lebih di dasarkan pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang timbul dan

---

<sup>55</sup> Ibid, halaman 30

dirasakan oleh WP. sendiri (kepatuhan secara sukarela), dari pada hanya sebagai keharusan yang akan efektif apabila disertai dengan paksaan atau sanksi belaka.

Terminologi “Patuh” yang berarti suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin<sup>56</sup> dalam tesis ini dipergunakan untuk menggambarkan suatu keadaan perilaku dari WP. yang berkesesuaian dengan hukum yang berlaku.

Hukum berarti keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi,<sup>57</sup> yang pada dasarnya merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam sistem perpajakan terdapat batasan-batasan (*constraints*) sebagai indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan (*tax compliance*) WP. Di antaranya menyangkut waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*time compliance*) dan jumlah pajak yang harus dibayar (*taxable compliance*). WP. dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan dirinya, tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta ; Balai Pustaka, 1989), halaman 654

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta : Liberty, 1991), halaman 38

<sup>58</sup> Pandiangan Liberti, “Kurang Bayar = Menunggak Pajak ? Perlu Konvergensi Terminologi”, *Berita Pajak No. 1401/Tahun XXXII/15 Agustus, 1999*, halaman 27

Menurut Arinta Kusnadi dan Moh. Zain, penciptaan iklim kepatuhan dan kesadaran membayar utang pajak tercermin dari keadaan:<sup>59</sup>

1. WP. Pahami atau berusaha untuk memahami Undang-undang pajak;
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat;
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar;
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Bertitik tolak dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dalam hubungannya dengan “Ekstensifikasi/intensifikasi” ini, dapat dikatakan bahwa perseorangan/badan hukum dapat dikatakan patuh adalah apabila mereka itu telah melaporkan kewajiban perpajakannya (mendaftarkan diri sebagai WP) dan melaporkan jumlah yang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta membayar pajak yang seharusnya terhutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai WP melaporkan jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan membayar pajak yang seharusnya terhutang secara tepat waktu, sebenarnya tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode-metode pemungutan, tata cara pemeriksaan/penghitungan dan sebagainya sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-undang pajak dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, akan tetapi terutama tergantung dalam sanubari masing-masing WP sampai sejauh mana ia mematuhi Undang-undang pajak.

Menurut Talcot Parsons, adanya suatu kepatuhan terhadap suatu (sistem) aturan ini berkonsekuensi interaksi-interaksi sosial akan berjalan

---

<sup>59</sup> Kusnadi, Arinta, Zain Moh, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), halaman 115

dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik-konflik yang terbuka ataupun terselubung dalam keadaan kronis.<sup>60</sup>

Apabila kondisi tersebut dihubungkan dengan teori “derajat kepatuhan” dari Hoefnagels, maka mereka itu dalam mendaftarkan dirinya sebagai WP. dan memenuhi kewajiban pajaknya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. WP patuh dan setuju terhadap ketentuan hukum yang ada, sehingga ia mendaftarkan dirinya dan membayar jumlah pajak yang ditetapkan;
2. WP patuh dan setuju terhadap hukum yang ada, ia mendaftarkan diri sebagai WP. dan membayar jumlah pajak yang ditetapkan, namun sebenarnya ia tidak setuju dengan ketentuan yang ada;
3. WP patuh terhadap hukumnya, ia mendaftarkan diri sebagai WP. dan membayar/melunasi jumlah pajak yang ditetapkan, namun sebenarnya ia tidak setuju dengan hukum dan dasar ketetapan pajaknya;
4. WP tidak patuh terhadap hukumnya, sehingga ia tidak mendaftarkan diri sebagai WP. dan tidak membayar pajaknya, namun sebenarnya ia setuju dengan hukum dan dasar ketetapannya;
5. WP tidak patuh baik terhadap hukum maupun dasar ketetapan pajaknya, sehingga ia tidak mendaftarkan diri dan membayar pajaknya.

Bertitik tolak dari gradasi kepatuhan yang dikemukakan oleh Hoefnagel tersebut, maka apabila dihubungkan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam

---

<sup>60</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), halaman 104

mendaftarkan dirinya sebagai WP, melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terhutang dan membayarnya tepat waktu dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak patuh dan setuju terhadap ketentuan hukum yang ada, sehingga ia mendaftarkan dirinya sebagai WP, melaporkan jumlah pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan membayar/melunasi jumlah pajak yang seharusnya terhutang tepat pada waktunya;
2. Wajib Pajak patuh dan setuju terhadap hukum yang ada, ia mendaftarkan dirinya, melaporkan pajaknya dan membayar/melunasi jumlah pajaknya secara tepat waktu, namun sebenarnya ia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap peraturannya;
3. Wajib Pajak patuh terhadap hukumnya, ia mendaftarkan diri sebagai WP, melaporkan jumlah pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta membayar pajaknya secara tepat waktu, namun sebenarnya ia tidak setuju dengan hukum yang melandasinya;
4. Wajib Pajak tidak patuh terhadap hukumnya, sehingga ia tidak mendaftarkan dirinya, ia tidak melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terhutang dan tidak membayar pajaknya secara tepat waktu, namun sebenarnya ia setuju dengan hukum dan dasar ketetapannya;
5. Wajib Pajak tidak patuh baik terhadap hukum maupun dasar ketetapan pajaknya, sehingga ia tidak mendaftarkan diri, melaporkan pajak sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya serta membayar pajaknya secara tepat waktu.

Keterkaitan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak, harus dibedakan dengan pengertian kesadaran pajak. Kepatuhan dalam arti *voluntary compliance*, atau kepatuhan sukarela adalah, dimana Wajib Pajak mau memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, terlepas apakah disebabkan Wajib Pajak takut akan sanksi perpajakan. Dalam sistem perpajakan terdapat batasan-batasan ( *constraints* ) sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak antara lain, menyangkut waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan ( *time compliance* ) dan jumlah pajak yang harus dibayar ( *taxable compliance*).<sup>61</sup>

Berbeda dengan kesadaran pajak ( *tax consciousness* ), disini masyarakat mengerti dan memahami fungsi dan manfaat pajak di dalam masyarakat, karena itu ia sadar akan pajak. Sadar akan pajak, berarti memahami juga akan hak dan kewajiban Wajib Pajak, dan akan menjadi *tax minded* ( suka membayar pajak ), dan pada akhirnya sampai kepada *tax discipline* (disiplin pajak),<sup>62</sup> dimana Wajib Pajak akan selalu memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat waktu.

Dilihat dari kemauan WP dengan kesadaran sendiri mau membetulkan SPT tahunan dan melunasi PPh yang kurang bayar, memang dapat dikatakan

---

<sup>61</sup> Afifin, MZ, *Optimalisasi Penagihan Pajak sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*, 2002 hal : 29 .

<sup>62</sup> Rocmat Soemitro, *Op. Cit.* hal 8-9

demikian. Namun tingkat kepatuhan Wajib pajak, menurut penelitian Betty dan Sally yang mempelajari tingkat sensitivitas Wajib Pajak terhadap resiko ketahuan dan menerima sanksi, mengelompokkan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku Wajib Pajak, sebagai berikut :<sup>63</sup>

1. Tingkat inflasi dan pengangguran, merupakan indikasi tidak tumbuhnya perekonomian, income percapita turun, daya beli lemah , masalahmasalah sosial;
2. Keyakinan bahwa hukum tidak mendeteksi, baik dalam teori dan praktek;
3. Persepsi bahwa usaha menghindar dan tidak membayar pajak sudah diterima secara general;
4. Sikap ketidak puasan masyarakat terhadap prioritas pengeluaran yang dilakukan pemerintah dan efisiensi administrasi pemerintah;
5. sanksi dan persepsi bahwa sanksi akan dilaksanakan dan diterapkan;
6. Adanya kepastian hukum;
7. Kesempatan menghindar, tergantung dari gambaran Wajib Pajak sendiri;
8. Kerumitan Undang-undang perpajakan, tingkat kerumitan ini akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Perlu dilakukan pendidikan perpajakan sejak di sekolah Dasar);
9. Faktor-faktor demografi., hal ini berkaitan dengan kultur masyarakat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan.

Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Betty dan Sally, menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya berdasarkan satu atau dua faktor

---

<sup>63</sup> Afifin, MZ, *Op. Cit* hal. 31.

saja, melainkan banyak faktor lain perlu menjadi bahan pertimbangan dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, berdasarkan penelitian, ternyata keragu-raguan Wajib Pajak tersebut disebabkan :

- a. Wajib Pajak masih menunggu dikeluarkannya kebijakan Pengampunan Pajak, karena Jaminan dan kepastian Pengampunan Pajak memang lebih tinggi karena Wajib Pajak sudah pasti tidak akan diperiksa, sementara itu *Sunset Policy* hanya memberikan penghapusan sanksi pajak jika Wajib Pajak memperbaiki surat pemberitahuan tahunannya, padahal menurut Dirjen Pajak dalam kondisi saat ini, pengampunan pajak tidak dimungkinkan karena membutuhkan pembahasan mendalam atas kategori pengampunannya, terutama untuk pidana pajak. kebijakan ini juga sangat sensitif dan kental muatan politisnya sehingga tidak mungkin dikeluarkan dalam waktu ini.<sup>64</sup>
- b. Adanya kekhawatiran masyarakat bahwa *Sunset Policy* tidak memberikan kepastian hukum, hal ini berkenaan dengan adanya anggapan bahwa apabila pemerintahan berganti maka bisa saja ketentuan Pasal 37A UU KUP tersebut dicabut dan Wajib Pajak bisa diperiksa lagi atas data yang sudah dilaporkan. Kekhawatiran ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena walaupun nanti dibuat Undang-undang Pajak baru, sesuai dengan asas hukumnya Undang-undang tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*). Oleh

---

<sup>64</sup> Dirjen Pajak Sebagaimana Dikuti Oleh Harian Tempo, 28 Juli, 2008



karena itu, kebijakan *Sunset Policy* merupakan kebijakan yang sudah final. Wajib Pajak tidak perlu khawatir akan diperiksa lagi. Dengan kata lain, kebijakan *Sunset Policy* yang dilandasi ketentuan Pasal 37 A UU Nomor 28/2007 tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, di samping itu kebijakan ini juga sangat *legitimate* karena telah melalui proses diskusi cukup panjang dan persetujuan DPR., pelaksanaannya pun dikawal dengan sejumlah peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Pajak yang telah diterbitkan guna memberi kepastian bagi Wajib Pajak. Jelas sekali *Sunset Policy* 2008 ditempatkan pada posisi sangat strategis dan serius dilaksanakan oleh pemerintah. Hal itu juga menjamin bahwa seandainya terjadi pergantian pejabat sekalipun, tidak akan mengubah garis kebijakan yang telah ditetapkan;

- c. Adanya kekhawatiran dari Wajib Pajak bahwa *Sunset Policy* adalah “jebakan” dari Pemerintah sehingga kemudian Wajib Pajak akan lebih mudah untuk diperiksa karena datanya sudah terkumpul dengan baik. Sebenarnya kebijakan *Sunset Policy* merupakan bentuk kepercayaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak, sehingga pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk menjebak Wajib Pajak karena ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang terpenting adalah

Wajib Pajak harus jujur dan benar dalam mengisi dan melaporkan SPT atau Pembetulan SPT.

Perlu pula diingat bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menggunakan data dan/atau informasi yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* tersebut untuk menerbitkan Ketetapan Pajak atas jenis pajak lainnya. Jadi, Wajib Pajak pada dasarnya akan dilindungi sepanjang Wajib Pajak telah membetulkan SPT Tahunan PPh, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai keadaan yang sebenarnya.

- d. Adanya kekhawatiran dari Wajib Pajak bahwa dengan mengikuti *Sunset Policy* maka semua hartanya maupun kegiatannya yang lain akan diketahui oleh *Fiscus*, sehingga mereka malah tidak mau mengikuti sunset atau mengikuti sunset dengan mengisinya secara tidak benar. Sebenarnya kekhawatiran semacam ini adalah menyangkut ketidakjujuran dari Wajib Pajak itu sendiri.

Direktorat Jenderal Pajak tetap akan memeriksa surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka *Sunset Policy*, hanya apabila ditemukan bukti baru yang menunjukkan bahwa SPT yang telah dilaporkan itu ternyata tidak benar, apalagi terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti *Sunset Policy* dan mengisi serta melaporkan pajaknya secara tidak benar. Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tertanggal 2 Desember 2008 No. 67/PJ/2008 tentang

Pemanfaatan Data atau Keterangan yang Berkaitan Dengan SPT tahunan PPh yang disampaikan Wajib Pajak (WP) dalam rangka pelaksanaan Pasa1 37A UU KUP beserta ketentuan pelaksanaannya.

Bukti baru tersebut adalah data atau keterangan (bukan dari hasil analisis) yang berkaitan dengan perpajakan yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, atau yang berasal dari pihak lawan transaksi, yang belum dieatiturnkan dalam SPT yang dilaporkan dalam rangka *Sunset Policy*. Namun, pemeriksaan terhadap SPT tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dirjen Pajak.

- e. Adanya pengaruh atas anggapan yang pissimistis dari beberapa kalangan terhadap kebijakan *Sunset Policy*, ekonom Iman Sugema misalnya, justru menanggapi miring kebijakan tersebut. Direktur *International Center for Applied Finance and Economics (Inter-CAFE)* Institut Pertanian Bogor ini mengatakan, tanpa pengawasan ketat, *sunset policy* hanya menimbulkan masalah.<sup>65</sup> Menurutnya, petugas pajak tetap harus bisa menalaah laporan yang diberikan Wajib Pajak dengan baik. Jika disalahgunakan, maka kejahatan perpajakan akan lebih sulit terdeteksi, Serupa dengan Iman, Guru Besar Hukum Keuangan Negara Universitas Indonesia Arifin Soeria Atmadja<sup>66</sup> mengatakan kebijakan ini rawan disalahgunakan oleh para Wajib Pajak besar. Selain itu, sistem ini diragukan keefektifannya dalam

---

<sup>65</sup> Harian Sinar Indonesia Baru, Juni 2008

<sup>66</sup> Ibid

menjaring Wajib Pajak besar, karena kesadaran hukum Wajib Pajak dan aparat pajak di Indonesia masih rendah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya keterkaitan kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang adalah ternyata berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, jumlah pembayaran pajak, jumlah SPT yang disampaikan, kurangnya Surat Ketetapan Pajak. Namun demikian masih banyak WP juga yang belum mematuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, masih banyak juga dari mereka yang belum mengetahui peraturan-peraturan yang berhubungan pendaftaran sebagai WP, hal ini terbukti dengan masih banyaknya WP yang mendaftarkan dirinya karena “terpaksa”, takut diperiksa dan dikenai sanksi, walaupun kebanyakan dari mereka ternyata telah mengetahui resiko/sanksi apabila tidak mendaftarkan diri sebagai WP. dan membayar pajaknya dengan benar.

**B. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang.**

Komponen penerimaan pajak sebagai unsur penerimaan negara dalam APBN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari

realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 1991/ 1992, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 20,1 triliun. Sedangkan pada tahun anggaran 2001 jumlah tersebut telah mencapai Rp 158,5 triliun atau meningkat lebih dari 6001% dalam kurun waktu sepuluh tahun. Dengan mengesampingkan faktor lain, seperti kenaikan nilai tukar dan inflasi, penerimaan pajak dalam rentang waktu sepuluh tahun tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Besarnya kebutuhan penerimaan pajak dalam APBN menuntut administrasi pajak di Indonesia untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif, karena sumber daya yang dimiliki oleh administrasi pajak terbatas.

Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya menjadikan kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak.

Meskipun demikian, kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, ditunjukkan dengan masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak dan dari wajib pajak yang terdaftar hanya sebagian yang melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebagai gambaran, misalnya pada tahun 2000, dari sekitar 200 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 1,3 juta orang yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang merupakan dasar hukum pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi yang juga mendasari kebijakan *Sunset Policy*, adalah merupakan kaidah hukum yang membimbing perilaku manusia terhadap perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam mendaftarkan diri dan memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Dengan kata lain mengarahkan sikap tindak atau perilaku pihak-pihak pada tujuan yang dikehendaki dan akan terjadi bila pihak lain itu mematuhi hukum atau sebaliknya.

Apabila kita mengacu pada hasil ekstensifikasi dan intensifikasi yang telah dilaksanakan, maka sebenarnya pengoptimalan kepatuhan Wajib Pajak itu dapat diupayakan dengan beberapa cara, yaitu :

#### **1. Pembenahan Administrasi Pajak (*Tax Administration*) :**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan dikenal adanya tiga unsur pokok, yaitu : <sup>67</sup>

- a) Kebijaksanaan Perpajakan (*Tax Policy*);
- b) Undang-undang Perpajakan (*Tax Laws*); dan
- c) Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*).

Kebijakan perpajakan merupakan sesuatu yang akan dituju, sedangkan Undang-undang perpajakan sebagai sarana untuk mencapai

---

<sup>67</sup> Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 1994), halaman 37

tujuan tersebut, dan administrasi perpajakan merupakan sarana mengimplementasikan kebijakan perpajakan.<sup>68</sup> Secara lebih luas administrasi pajak mempunyai pengertian :<sup>69</sup>

- a) Suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak;
- b) Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan pemungutan pajak; dan
- c) Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau suatu badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang digariskan dalam kebijakan pajak berdasarkan sarana hukum yang ditentukan dalam Undang-undang perpajakan

Menurut D. Nowak kunci utama suksesnya kebijakan pajak berada dalam administrasi pajak.<sup>70</sup> Berdasarkan penelitian diketahui bahwa sistem administrasi perpajakan yang baik ternyata cukup berperan dalam meningkatkan laju penerimaan pajak.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid

<sup>69</sup> Mansury, *Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak Dan Administrasi Pajak*, Majalah Hukum Dan Pembangunan, (Jakarta ; Universitas Indonesia, 2000), halaman 285

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Tedy Iswahyudi, *Reformasi Perpajakan : Menuju Sistem Administrasi Perpajakan Yang Menopang Penerimaan Pajak*, dalam *Majalah Berita Pajak Nomor 1536, Tahun XXXVII, Tanggal 1 April 2005*, halaman 33

Merujuk pada hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pengumpulan pajak sebenarnya ditentukan oleh semakin kecilnya kesenjangan kepatuhan tersebut, artinya semakin patuh masyarakat mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan kemudian membayar pajak dengan jumlah yang sebenarnya, maka kesenjangan kepatuhan akan semakin kecil dan ini berarti pemungutan pajak akan lebih berhasil.

Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi kesenjangan kepatuhan tersebut, maka akan semakin sedikit jumlah pajak yang dapat terkumpul. Demikian pula rendahnya *tax ratio* terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) menunjukkan terdapatnya kesenjangan sistem administrasi perpajakan kita.<sup>72</sup>

Oleh karena itu pembaharuan dan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan harus terus diupayakan disusun dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi instrumen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien, hal ini adalah untuk menjawab keluhan Wajib Pajak yang masih menganggap rumit sistem perpajakan yang berlaku, misalnya adanya beberapa jenis pajak yang berlaku yang memberikan kesan “tumpang tindih” bagi WP, sistem penghitungan pajak yang masih sulit (karena adanya beberapa lapisan tarif pajak, adanya keharusan membuat pembukuan secara standar bagi WP Badan dan WP. yang omsetnya sudah di atas enam ratus juta rupiah), adanya peraturan-peraturan perpajakan

---

<sup>72</sup> Ibid.



yang menimbulkan multi tafsir, pengisian formulir perpajakan yang tidak mudah (SPT akhir, SPT. masa, Surat Setoran Pajak), proses pemenuhan hak Wajib Pajak yang tidak sederhana (permohonan restitusi, keberatan, pemindahbukuan pajak, penycilan pembayaran pajak, Surat Keterangan Bebas, permohonan pemusatan terhutangnya pajak), yang kesemuanya itu masih dianggap sulit dan membingungkan oleh Wajib Pajak. Dengan adanya penyederhanaan dan pembaharuan sistem perpajakan secara terus menerus tersebut diharapkan mampu mendorong Wajib Pajak untuk secara sukarela mendaftarkan diri dan membayar pajaknya secara benar dan tepat waktu.

Menurut Carlos A Silvani, administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut :<sup>73</sup>

- a) Wajib Pajak yang tidak terdaftar atau *unregistered tax payers*, artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, walaupun seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak;
- b) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau *stopfiling taxpayers*, yaitu Wajib pajak yang sudah terdaftar di administrasi kantor pajak, tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Administrasi pajak dituntut untuk dapat mengumpulkan

---

<sup>73</sup> Ibid.

data sekaligus menindaklanjutinya dengan meminimalkan kasus seperti ini;

- c) Penyelundup pajak atau *tax evaders*, Yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan per Undang-undangan perpajakan. Sistem *Self Assessment* yang berlaku sekarang memang rentan menyebabkan terjadinya modus seperti ini, karena tergantung kejujuran Wajib Pajak;
- d) Penunggak Pajak atau *delinquent tax payers*, yaitu Wajib Pajak yang tidak membayar atau melunasi utang pajaknya yang dalam setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.

Secara teknis perbaikan administrasi perpajakan ini dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan sistem dan prosedur perpajakan guna memudahkan para Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, serta mempermudah aparat pajak dalam melakukan pengawasan.

Aplikasi perubahan sistem administrasi perpajakan ini pada dasarnya adalah untuk mempermudah/menyederhanakan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak maupun pengawasan oleh fiskus, yang sarannya dapat berupa :<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Gunadi, *Intensifikasi Perpajakan Dan Arah Amandemen Undang-undang Pajak 2004*, Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 26 Oktober 2004, halaman 7

- a) *e-SPT*, yaitu pelaporan SPT. elektronik yang bertujuan membantu Wajib Pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ataupun Surat Pemberitahuan Masa;
- b) *e-Filling*, yaitu pelaporan SPT. elektronik dimana Wajib Pajak dapat melakukan kegiatan pelaporannya dengan mengisi data pelaporannya sesuai dengan form yang ditentukan;
- c) *e-Payment/MP3*, yaitu pembayaran *on line* dimana Wajib Pajak disediakan fasilitas untuk dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya melalui Bank on line yang datanya sekaligus akan terkirim ke KPP. masing-masing Wajib Pajak;
- d) *e-Registrations*, yaitu pendaftaran dan perubahan data on line dimana wajib pajak diberikan fasilitas berbasis *Aplikasi Web* untuk melakukan pendaftaran dan perubahan data;
- e) Membentuk KPP. Modern (KPP. WP. Besar, Madya dan Pratama), serta menempatkan *Account Representative* (AR), yang tujuannya adalah untuk mengetahui segala tingkah laku, ruang lingkup bisnis, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diawasi, dan melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak secara tuntas pada satu meja. AR Bertanggung jawab membantu seluruh kebutuhan administrasi Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

KPP modern ini mempunyai struktur yang berbeda dengan KPP. yang selama ini ada. Pada kantor tersebut struktur organisasi dibentuk berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak, dengan demikian maka pelayanan kepada Wajib Pajak dapat terintegrasi dan tidak harus menghadapi birokrasi yang rumit.

Semua aplikasi perubahan sistem administrasi perpajakan ini bertujuan untuk mengurangi pertemuan antara Wajib Pajak dengan aparat pajak serta untuk lebih mengefisienkan waktu Wajib Pajak dan para pelaku dunia usaha dalam mengurus keperluan pajaknya.<sup>75</sup>

Pada dasarnya perubahan-perubahan sistem administrasi melalui aplikasi sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan oleh Ditjen Pajak namun belum sepenuhnya terlaksana, misalnya belum semua tenaga SDM dapat diandalkan, belum sempurnanya sistem administrasi KPP. Modern (misalnya belum seragamnya sistem komputer yang dipergunakan antara KPP. Pratama dan KPP. Madya), oleh karena itu perlu diupayakan agar sistem ini dapat segera disempurnakan pada semua KPP.

## **2. Perbaikan Pelayanan :**

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu

---

<sup>75</sup> Gunadi, *Pokok-pokok Reformasi Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Investasi Dunia Usaha*, Majalah Berita Pajak, Nomor 1542/Tahun XXXII/Juli 2005, halaman 20

yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan<sup>76</sup>

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **3. Penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak;**

Apabila kita melihat tabel 5 di atas, maka penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak memang harus dilakukan, karena dari data yang ada menunjukkan bahwa penyuluhan

---

<sup>76</sup> Boediono. *Pelayanan Prima Perpajakan*. (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2008), halaman 10

dilakukan kepada Wajib Pajak setelah akan berakhirnya *Sunset Policy*, sehingga masih banyak Wajib Pajak yang tidak/kurang mengetahui tentang hak dan kewajibannya, misalnya : WP. tidak tahu mengapa tiba-tiba ia mendapat surat himbauan untuk mengikuti *Sunset Policy*, bagaimana mendaftarkan diri sebagai WP., bagaimana menghitung pajak secara benar, bahkan mereka juga tidak tahu mengapa mereka harus di diperiksa. dan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak yang kemudian harus dibayar/dilunasinya, mereka juga tidak tahu upaya apa yang dilakukan apabila Pengukuhan sebagai WP. atau Surat Ketetapan Pajak itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Adanya ketidak tahuan WP. tersebut menandakan bahwa sebenarnya mereka itu butuh akan bimbingan/penyuluhan. Penyuluhan merupakan terjemahan dari *counseling*, yaitu bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik. Bimbingan menurut Moh. Surya, ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerunaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.<sup>77</sup> Sedang penyuluhan adalah merupakan suatu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang individu, di

---

<sup>77</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan Dan Penyuluhan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), halaman 2

mana yang seorang (yaitu penyuluh) berusaha membantu yang lain (yaitu klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang.<sup>78</sup>

Pelaksanaan program penyuluhan hukum tersebut merupakan suatu syarat yang sangat penting di dalam penegakan hukum maupun pelembagaannya, karena warga masyarakat yang dalam hal ini WP. akan mentaati hukum, apabila ia mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>79</sup>

Dalam melaksanakan bimbingan/penyuluhan hukum tersebut perlu dipilih sasaran yang tepat, agar diperoleh hasil yang optimal. Sasaran penyuluhan tersebut terdiri dari : Sasaran utama dan sasaran pendukung.<sup>80</sup>

Sasaran utama dari penyuluhan hukum ini adalah :

- a) Masyarakat pada umumnya, tujuannya adalah untuk menciptakan iklim dan citra perpajakan yang baik, sehingga diperoleh dukungan yang positif dari seluruh anggota masyarakat dalam arti terbentuk suatu opini (pendapat) masyarakat yang menerima kewajiban perpajakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan;

---

<sup>78</sup> Ibid, halaman 5

<sup>79</sup> Ibid, halaman 13

<sup>80</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, *Panduan Materi Penyuluhan Perpajakan, Buku VI*, (Jakarta : Pusat Penyuluhan Perpajakan, 1991), halaman 18-19

- b) Masyarakat WP. , baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, tujuannya adalah untuk membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya

Sedang sasaran pendukungnya yaitu :

- a) Konsultan Pajak, sebagai mitra kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam membina dan menyadarkan WP.
- b) Instansi Pemerintah, baik departemen maupun lembaga non departemen, agar pejabat tersebut melakukan usaha-usaha, sehingga anggota masyarakat di lingkungan nya menyadari kewajiban perpajakannya;
- c) Lembaga kemasyarakatan, asosiasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan dan lain sebagainya.

Dengan dilakukannya penyuluhan yang terarah dan berkesinambungan ini diharapkan dapat lebih mempercepat penambahan jumlah Wajib Pajak dan setoran Pajaknya.

Sebagaimana layaknya sebuah pemeriksaan, untuk melakukan pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan perencanaan agar hasil pemeriksaan tersebut optimal. Salah satu langkah dalam perencanaan pemeriksaan adalah penentuan *audit risk* dan *inherent risk* dari obyek pemeriksaan. Penentuan risiko tersebut dilakukan untuk menilai tingkat kesalahan secara material dalam suatu laporan keuangan (rendah, menengah dan tinggi) sehingga dapat



digunakan untuk menentukan tingkat kedalaman pemeriksaan yang akan dilakukan.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pemeriksaan pajak, penentuan *audit risk* dan *inherent risk* dapat dianalogikan dengan penentuan risiko bahwa satu wajib pajak akan melakukan pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga berpotensi terdapat kesalahan atau wajib pajak tersebut tidak patuh dalam pelaporan pajaknya.

Penentuan risiko wajib pajak dapat dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu di tingkat kebijakan berupa penentuan wajib pajak mana yang akan diperiksa (*audit selection*) dan tingkat operasional, yaitu pada saat melakukan pemeriksaan wajib pajak.

Penentuan risiko wajib pajak pada tingkat kebijakan mutlak dilakukan karena administrasi pajak tidak akan mungkin melakukan pemeriksaan atas seluruh wajib pajak yang terdaftar mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa yang efektif (*effective audit case selection*) akan menimbulkan persepsi positif di wajib pajak karena wajib pajak yang patuh mempunyai risiko diperiksa yang lebih kecil dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh.

Di sisi lain, pemeriksaan akan menjadi lebih efisien karena hanya fokus pada wajib pajak yang tidak patuh. Pemeriksaan yang tidak memperhitungkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat berakibat pada dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak wajib pajak patuh, sementara wajib pajak yang tidak patuh

justeru tidak diperiksa. Hal ini akan berakibat pada rendahnya efektivitas tujuan pemeriksaan yaitu terciptanya kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Oleh karena itu, administrasi pajak perlu melakukan pendekatan yang sistematis dalam menentukan wajib pajak mana yang akan diperiksa. Pendekatan sistematis yang umum digunakan oleh administrasi pajak di berbagai negara adalah pendekatan berdasarkan risiko ketidakpatuhan wajib pajak (*risk-based approach*). Risiko ketidakpatuhan wajib pajak adalah risiko yang harus ditanggung oleh administrasi pajak (atau pemerintah pada umumnya) karena perilaku wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan sehingga ada pajak terutang yang tidak dibayar (*taxes at risk*).

Dalam kaitannya dengan *Sunset Policy* ini, sebenarnya telah ada landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaannya, yaitu UU. Nomor 28/2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta kebijakan-kebijakan yang mendukungnya. walaupun demikian ternyata belum semua Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar, banyak Wajib Pajak yang memilih tidak mengikuti *Sunset Policy*, masih ada Wajib Pajak yang mengisi SPT pembetulanannya belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, masih ada Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya dengan tidak tepat waktu. Di samping itu jumlah Surat Ketetapan Pajak yang merupakan salah satu indikasi adanya ketidak patuhan Wajib Pajak ternyata masih juga ada.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata memang terdapat beberapa kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan *Sunset Policy* dimaksud. Kendala-kendala tersebut meliputi :

**1. Kendala ekstern ini dapat berupa :**

- a. Ketidaktahuan WP. akan hukumnya, misalnya : WP. tidak tahu apa yang dimaksud dengan *Sunset Policy*, mengapa kemudian tiba-tiba ia mendapat surat himbauan untuk mengikutinya, bagaimana ia harus membetulkan SPT nya dengan menghitung pajaknya secara benar, dimana dan kapan ia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan bagaimana cara membayar pajaknya, dengan kata lain mereka itu belum tahu hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, sehingga kesemuanya itu mengakibatkan tidak/belum terdaftarnya mereka sebagai Wajib Pajak dan tidak dibayarnya pajak secara benar dan tepat waktu. Adanya ketidak tahuan WP. tersebut menandakan bahwa sebenarnya mereka itu butuh akan bimbingan/penyuluhan. Oleh karena itu kepada mereka baik yang belum terdaftar sebagai Maupun yang sudah terdaftar sebagai WP. harus diberikan penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan materi yang ada hubungannya dengan perpajakan, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak;
- b. Adanya kurang sadaran dan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan nya, hal ini seharusnya dapat di atasi dengan melakukan

penyuluhan/sosialisasi perpajakan yang terarah dan berkesinambungan dan melakukan *law enforcement* kepada Wajib Pajak yang memang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. WP tidak dapat ditemukan.

Tidak dapat diketemukannya WP. tersebut antara lain disebabkan :

- 1) Tidak diketemukannya alamat yang tertera dalam data yang ada;
- 2) Alamatnya jelas/ada, namun bukan WP. yang menempatinnya;
- 3) Alamatnya ada, WP. yang menempatinnya, namun ia jarang sekali/tidak pernah berada di alamat tersebut;
- 4) WP sudah pindah ke tempat yang tidak dapat diketahui lagi.

Apabila dijumpai kendala yang demikian ini, maka upaya yang dapat ditempuh adalah : Dengan menanyakan kepada para tetangga/Ketua RT/RW/Kelurahan/Kecamatan setempat untuk mengetahui informasi mengenai keberadaan WP. Kalau masih bertempat tinggal di alamatnya maka surat himbauan harus diserahkan kepada yang bersangkutan.

d. Wajib Pajak tidak mau menerima petugas dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam pelaksanaan *Sunset Policy* kadang-kadang petugas mendatangi langsung di tempat Wajib Pajak untuk memberikan counseling, ataupun himbauan namun banyak Wajib Pajak yang tidak

mau menerima kedatangan petugas. Apabila WP. tidak mau menerima kedatangan petugas maka petugas dapat membuat Berita Acara bahwa WP tidak mau menerima petugas, kemudian petugas dapat menindaklanjuti dengan tindakan berikutnya, misalnya dengan memberikan NPWP/PKP secara jabatan atau mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak ;

- e. WP ternyata telah terdaftar di KPP lain walaupun mereka melakukan usaha di wilayah hukum KPP lama. Untuk mengatasi hal tersebut maka KPP. lama harus memberitahukan kepada Wajib Pajak agar ia memilih untuk dikukuhkan di salah satu KPP.

## **2. Kendala intern :**

Di samping kendala ektern sebagaimana tersebut di atas, ada juga kendala- kendala intern, yaitu kendala-kendala yang berasal dari dalam KPP. sendiri, yang antara lain terdiri dari .

- a. Terbatasnya jumlah dan kemampuan sumberdaya manusia (SDM), yang meliputi :

- 1) Jumlah sumber daya manusia yang menangani *Sunset Policy* di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Secara garis besar kegiatan yang berkenaan dengan *Sunset Policy* di masing-masing Seksi di KPP. adalah:

- a) Seksi Pelayanan : Menerima, meneliti, membuat check list kelengkapan SPT yang disampaikan WP, membuat Buku

Register Harian Penerimaan SPT . mengirimkan SPT. Ke Seksi PDI untuk direkam dan menerima kembali SPT yang telah direkam tersebut kemudian memberkaskan ke dalam berkas WP. Yang bersangkutan. (ditangani oleh kurang lebih empat orang petugas)

- b) Seksi Pengawasan Dan Konsultasi : Sosialisasi mengenai *Sunset Policy*, membuat himbauan kepada WP. untuk mengikuti *Sunset Policy*, meneliti kebenaran pengisian SPT. *Sunset Policy* (ditangani oleh kurang lebih 16 orang petugas yang disebut *Account Representative*)
- c) Seksi Pengolahan Data Dan Informasi (PDI) : Meneliti dan merekam SPT. *Sunset Policy* (ditangani oleh kurang lebih dua orang petugas)

Sedangkan jumlah Wajib Pajak PPh. Rata-rata adalah 25.000 KPP, dengan demikian setiap petugas rata-rata menangani 1.137 WP. PPh., padahal para petugas tersebut selain bertugas mempersiapkan *Sunset Policy* juga mempunyai tugas lain yang tidak kalah banyaknya dan terbatas jangka waktu penanganannya, sedangkan kualifikasi mereka juga berbeda-beda, sehingga menghasilkan kualitas pekerjaan yang berbeda pula.

Sebagaimana diketahui bahwa tugas yang diemban oleh petugas-petugas tersebut. merupakan tugas yang tidak ringan, karena

dalam melaksanakan tugasnya ia harus berhadapan langsung dengan berbagai WP. yang tentu saja mempunyai pula berbagai perangkat dalam menyikapi pemenuhan kewajiban pajaknya. Dalam menghadapi kondisi yang demikian ini tentu dibutuhkan petugas yang mumpuni, yaitu petugas yang benar-benar terampil dan mempunyai keahlian/kemampuan di bidang tugasnya, mampu menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang ada, mampu menjawab persoalan yang mungkin dikemukakan oleh WP., tetap memegang teguh kaidah yang berlaku, serta mampu mempertanggungjawabkan semua tugasnya secara benar.

Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya yang harus dilakukan untuk memperoleh petugas yang mumpuni di antaranya adalah : Melakukan seleksi secara cermat, yaitu dengan mengamati apakah yang bersangkutan mampu atau mempunyai bakat untuk itu, sebab dengan menetapkan kualifikasi SDM secara tepat, akan diperoleh para pekerja yang memiliki kinerja yang tinggi, yang secara bersama-sama akan menciptakan dan membentuk kinerja organisasi yang tinggi pula. Sebaliknya apabila kualifikasi tersebut tidak akurat maka akan dihasilkan pekerja yang memiliki kinerja rendah.<sup>81</sup> di samping itu untuk menyegarkan dan mencari petugas sesuai dengan kemampuannya perlu difikirkan

---

<sup>81</sup> H. Hadari Nawawi, *Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif*, (Yogyakarta : Gajahamada University Press, 2001), halaman 19

adanya mutasi karyawan, karena pada prinsipnya mutasi adalah memutasikan karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, sehingga semangat dan produktivitas kerjanya meningkat.<sup>82</sup>

- 2) Adanya petugas yang “kurang bernyali”, sehingga ia tidak berani mendatangi WP. yang dianggap “membahayakan” (karena kadang-kadang WP. “mengancam” petugas, dengan melakukan hal-hal yang kurang terpuji baik dilakukan sendiri ataupun melalui pihak ketiga).

Di samping itu ada juga petugas yang bermental “kurang baik”, misalnya malas, kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, membuat laporan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga laporan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan mengadakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada yang bersangkutan baik secara formal, yaitu melalui rapat- rapat pembinaan dan diskusi-diskusi, maupun secara non formal, yaitu dengan mengadakan pendekatan dari hati kehati kepada para para pemeriksa. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan adanya umpan balik/saling tukar mformasi, koreksi-kareksi, peningkatan kualitas dan kwantitas kerja serta tumbuhnya

---

<sup>82</sup> H. Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), halaman 101



motivasi yang kuat dalam pelaksanaan tugas, sehingga mampu menumbuhkan rasa bangga pada jenis tugas yang diembannya;

- 3) Adanya keterlambatan aturan pelaksanaan yang berkenaan dengan pelaksan *Sunset Policy*, sebagaimana diketahui bahwa kebijakan *Sunset Policy* dimulai pada awal tahun 2008, namun banyak aturan pelaksanaannya yang dikeluarkan pada pertengahan tahun bahkan akhir tahun 2008, misalnya SE-33/PJ/2008 baru dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2008, SE-34/PJ/2008 baru dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2008, SE-55/PJ/2008 baru dikeluarkan pada tanggal 23 September 2008, SE-56/PJ/2008 baru dikeluarkan pada tanggal 23 September 2008, dan seterusnya.

#### 4) Keterbatasan Data

Data yang selama ini dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah berasal dari data intern dan ekstern. Data intern merupakan data yang telah diolah dari kegiatan Wajib Pajak, misalnya bukti potong, SPT., Surat Setoran Pajak dan sebagainya. Data ekstern, yaitu data yang berasal dari instansi atau lembaga lainnya, misalnya saham, Ijin Mendirikan Bangunan, mobil, telpon, PDAM, Kapal, data Imigrasi dan sebagainya.

- 5) Seandainya para sumber data tersebut memperlakukan datanya sesuai dengan Pasal 35 UU.

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu mengadministrasikan secara tertib dan mengirimkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki suatu basis data yang akurat dan dapat diandalkan, namun pada kenyataannya tidak semua instansi/lembaga tersebut mengadministrasikan dan mengirimkannya secara tertib, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi secara berkesinambungan dan pembuatan Nota Kesepahaman antara Ditjen Pajak dan Instansi/Lembaga terkait;

- 6) Kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan khususnya peraturan mengenai *Sunset Policy* kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa ternyata di pihak WP kendala yang utama adalah masih banyaknya WP yang belum mengetahui peraturan-peraturan yang ada, khususnya yang menyangkut *Sunset Policy*, WP juga banyak yang belum mengetahui hak dan kewajibannya, namun kebanyakan dari mereka telah mengetahui resiko dan takut terhadap pemeriksaan pajak.

Di samping itu ada pula WP. yang memang dengan sengaja menghindarkan diri dari kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mempersulit pelaksanaan *Sunset Policy*, misalnya dengan

mengancam petugas, sengaja tidak mau menemui petugas, dan sebagainya.

Walaupun alternatif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dimungkinkan, tetapi kadang-kadang memang sulit untuk melaksanakannya, namun bagaimanapun juga kendala-kendala tersebut harus dicari jalan keluarnya, agar tujuan dari kebijakan *Sunset Policy* itu sendiri yaitu : Membangun basis data yang akurat, meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan pembayaran pajaknya, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat terealisasi secara optimal.

Dalam kaitannya untuk mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy* tersebut Kantor-kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah pembenahan secara internal, baik dari segi kecakapan para petugasnya maupun pembenahan administrasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut Dirjen Pajak juga telah menginstruksikan kepada para Kantor Wilayah dan KPP-KPP. agar :<sup>83</sup>

1. Selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) dan masyarakat sesuai dengan janji pelayanan;
2. Memasang papan informasi pelayanan perpajakan sebagai janji dan informasi kepada WP yang berisi : persyaratan, prosedur layanan, standar

---

<sup>83</sup> Surat Edaran Nomor SE-55/PJ/2008 tanggal 23 September 2008, Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpajakan

waktu layanan dan pencantuman bebas biaya layanan perpajakan (semua layanan gratis);

3. Selalu menjaga Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) agar tidak dalam keadaan kosong pada jam pelayanan (jam pelayanan mulai pukul 07.30 sampai 17.00 waktu setempat tanpa waktu istirahat) dan senantiasa memelihara fasilitas Tempat Pelayanan Terpadu dalam keadaan baik dan mengoperasikannya untuk kepentingan pelayanan;
4. Selalu mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak terutama menjaga sikap profesional dan integritas dalam memberikan pelayanan, memperhatikan etos kerja (tidak korupsi waktu kerja), menjaga ketertiban dalam berpakaian, selalu bersepatu di ruang kantor dan selalu mengenakan tanda pengenal pegawai ketika dalam tugas;
5. Selalu meningkatkan kinerja pelayanan dan berupaya mempercepat waktu pelayanan sesuai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan DJP;
6. Selalu menjaga sikap pelayanan dengan berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam SE Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2007 tanggal 15 Oktober 2007 tentang Pelayanan Prima dan Buku Panduan Pelayanan Prima (buku saku warna biru);

7. Selalu berupaya meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada DJP sesuai dengan SE Direktur Jenderal Pajak Nomor 5E-56/PJ/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Iklan Layanan Masyarakat.

Di samping itu Kanwil dan KPP-KPP juga berupaya untuk meningkatkan kinerja para pegawainya dengan mengadakan *Inhouse Training*, Pelatihan-pelatihan maupun pembinaan kepada petugas baik secara formal maupun secara non formal, yaitu melalui rapat-rapat pembinaan maupun tatap muka lainnya secara non formal.

1. Membuat himbauan dan *Counseling* kepada Wajib Pajak untuk mengikuti *Sunset Policy* :

Tujuan *counseling* dan dihimbaunya Wajib Pajak ini adalah untuk memberitahukan dan mengingatkan Wajib Pajak tentang adanya kebijakan *Sunset Policy*, terutama yang berkenaan dengan pengertian *Sunset Policy*, batas waktu berlakunya, hak-hak, kewajiban WP, bagaimana cara membetulkan SPT. Nya, keuntungan dan kerugiannya apabila mengikuti atau tidak mengikutinya.

2. Sosialisasi/penyuluhan *Sunset Policy* :

Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy* Kanwil Dan KPP. Juga telah melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada para Wajib Pajak. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah : .

- a) Pemasangan spanduk, billboard, balon udara;

- b) Melalui Media Televisi, Radio, dan Cetak yang meliputi : Iklan Layanan Masyarakat, artikel, *advetorial*; *talk show*, pengumuman di media cetak.
- c) Mengajak para tokoh daerah, pemuka agama ;
- d) Kerjasama dengan asosiasi; Universitas, Pemda
- e) Kampanye simpatik di tempat-tempat strategis baik outdoor maupun indoor;
- f) Penyebaran booklet, leaflet serta stiker;

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan *Sunset policy* diharapkan mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk meningkatkan *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela). Kepatuhan Wajib Pajak yang diharapkan sehubungan dengan adanya *Sunset Policy* ini adalah mencakup kepatuhan jangka pendek dan jangka panjang. Kepatuhan jangka pendek terkait dengan keterbukaan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar. Sedangkan kepatuhan jangka panjang menunjukkan bahwa Wajib Pajak taat terhadap peraturan tanpa harus dilakukan upaya penegakan hukum. Dalam jangka panjang, peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak akan membawa dampak pada peningkatan penerimaan pajak.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterkaitan kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang ternyata berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, jumlah pembayaran pajak, jumlah SPT yang disampaikan, kurangnya Surat Ketetapan Pajak. Namun demikian masih banyak WP juga yang belum mematuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, masih banyak juga dari mereka yang belum mengetahui peraturan-peraturan yang berhubungan pendaftaran sebagai WP, hal ini terbukti dengan masih banyaknya WP yang mendaftarkan dirinya karena “terpaksa”, takut diperiksa dan dikenai sanksi, walaupun kebanyakan dari mereka ternyata telah mengetahui resiko/sanksi apabila tidak mendaftarkan diri sebagai WP. dan membayar pajaknya dengan benar. Sedangkan upaya untuk menjaga meningkatkan kepatuhan tersebut adalah dengan cara:

- a. Pembinaan Administrasi <sup>126</sup> (Tax Administration);

- b. Perbaikan Pelayanan;
- c. Penyuluhan *secara* sistimatis dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak; dan Penegakan hukum

2. faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang adalah :

- a. Ketidak tahuan WP akan hukumnya;

Adanya ketidak tahuan WP. tersebut menandakan bahwa sebenarnya mereka itu butuh akan bimbingan/penyuluhan Oleh karena itu kepada mereka baik yang belum terdaftar sebagai WP. Maupun yang sudah terdaftar sebagai WP. harus diberikan penyuluhan secara sistimatis dan berkesinambungan, dengan materi yang ada hubungannya dengan perpajakan, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak;

- b. Adanya kurang sadaran dan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya, hal ini seharusnya dapat di atasi dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi perpajakan yang terarah dan berkesinambungan dan melakukan *law enforcement* kepada Wajib Pajak yang memang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. WP tidak dapat diketemukan.



Apabila dijumpai kendala yang demikian ini, maka upaya yang dapat ditempuh adalah : Dengan menanyakan kepada para tetangga/Ketua RT/RW/Kelurahan/Kecamatan setempat untuk mengetahui informasi mengenai keberadaan WP. Kalau WP. Masih bertempat tinggal di alamatnya maka Surat himbauan harus diserahkan kepada yang bersangkutan.

- d. Wajib Pajak tidak mau menerima petugas dengan alasan yang tidak jelas. Apabila WP. tidak mau menerima kedatangan petugas, maka petugas dapat membuat Berita Acara bahwa WP. tidak mau menerima petugas, kemudian petugas dapat menindaklanjuti dengan tindakan berikutnya, misalnya dengan memberikan NPWP/PKP secara jabatan atau mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak;
- e. WP ternyata telah terdaftar di KPP lain, walaupun mereka melakukan usaha di wilayah hukum KPP lama. Untuk mengatasi hal tersebut maka KPP. lama harus memberitahukan kepada Wajib Pajak agar ia memilih untuk dikukuhkan di salah satu KPP.
- f. Terbatasnya jumlah dan kemampuan sumberdaya manusia (SDM), Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya yang harus dilakukan untuk memperoleh petugas yang mumpuni di antaranya adalah : Melakukan seleksi secara cermat kepada para petugas yang akan ditempatkan di suatu tempat tertentu;

- g. Adanya petugas yang “kurang bernyali”, sehingga ia tidak berani mendatangi WP. yang dianggap “membahayakan”, di samping itu ada juga petugas yang bermental “kurang baik”, sehingga pekerjaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan mengadakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada yang bersangkutan baik secara formal, yaitu melalui rapat- rapat pembinaan dan diskusi-diskusi, maupun secara non formal, yaitu dengan mengadakan pendekatan dari hati kehati kepada para para petugas, bahkan kalau perlu memutasikan petugas tersebut sesuai dengan kemampuan bidang tugasnya;

- a. Adanya keterlambatan aturan pelaksanaan yang berkenaan dengan pelaksanaan *Sunset Policy*, oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi yang terus menerus, dan hal ini telah dilaksanakan;
- b. Keterbatasan data WP. Untuk mengetahui kebenaran *Sunset Policy* : Hal ini bisa diatasi dengan menaadminstrasikan data secara baik, sosialisasi kepada instansi/lembaga yang terkait secara berkesinambungan;
- c. Kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan khususnya peraturan mengenai *Sunset Policy* kepada masyarakat.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi penerapan sistem *self assesment* berkaitan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) di Kota Semarang, masih banyak Wajib Pajak yang belum melakukan penghitungan sendiri masih perlu bantuan dari petugas pajak juga masih ditemukan adanya sanksi administrasi berupa denda. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Semarang perlu lebih aktif mensosialisasikan peraturan mengenai penerapan sistem *self assesment* berkaitan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* kepada masyarakat luas.
2. Pada saat ini baru sebagian masyarakat yang benar-benar memahami secara tepat apa itu *Sunset Policy* tersebut dan melaksanakan kewajiban secara tepat waktu dan jujur, masih ada yang acuh tak acuh bahkan tidak mengerti sama sekali, untuk meningkatkan kepatuhan perlu adanya sosialisasi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah desa maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai perhatian kepada permasalahan perpajakan dan penegakan hukum.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Bambang Sunggono, 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Boediono. 2008. *Pelayanan Prima Perpajakan*. PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 1991. *Panduan Materi Penyuluhan Perpajakan, Buku VI*, Pusat Penyuluhan Perpajakan, Jakarta.

Dewa Ketut Sukardi, 1995. *Proses Bimbingan Dan Penyuluhan*, Rineka Cipta, Jakarta.

H. Hadari Nawawi, 2001. *Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

H. Malayu SP. Hasibuan, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.

Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan, 1970.*Power Adnd Society*, New Haven : Yale University Press,

Indra Ismawan, 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Alex Media Komputindo, Jakarta.

Kadjatmiko, *UU BPHTB Tahun 2000 Tampung Pengembalian Tatanan dan Perilaku Ekonomi Masyarakat*, Berita Pajak No.1438/XXXIII/1 Maret 2001.

Kusnadi, Arinta, Zain Moh, 1990. *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Irfan Islami, 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Mansury, 1994. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Bina Rena Pariwara, Jakarta.

Miyasto, 1997, *Fungsi Mengatur Dan Penegakan Law Enforcement Dalam Undang-Undang Pajak Tahun 1994*, Bahan Kuliah Umum Mahasiswa S2 Ilmu Hukum, Fakultas Pasca Sarjana UNDIP, Semarang.

Rimsky K. Judisseno, 1999. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rochmad Soemitro, 1982. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.

-----, 1986, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung.

-----, 1998. *Asas Dan dan Perpajakan 2*, Refika Aditama, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salamun, AT. *Pajak, Citra dan Upaya Pembaharaunnya, Revisi Hukum Pajak, Citra dan Bebannya*, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 1993)

Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.

-----, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta.

-----dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soetrisno Hadi, 1985, *Metodologi Reseachr Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta : Liberty, 1991),

## **B. Artikel dan/atau Makalah**

Adinur Prasetyo, Menuju APBN Mandiri, Berita Pajak Nomor 1524/Tahun XXXVII/1 Oktober, 2004;

Bintoro Tjokroamijoyo, *Analisa Kebijakanaksanaan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional*, Majalah Administrator No. 5 & 6 Tahun IV, 1976;

- Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Keuangan 2008;
- Gunadi, *Pajak Dan Aplikasi Undang-undang Penagihan Pajak Sebagai Upaya Pengamanan*, Berita Pajak 1357;
- Gunadi, *Tinjauan Aspek Keadilan Dalam Penagihan Pajak*, Berita Pajak 1357,
- Gunadi, *Intensifikasi Perpajakan Dan Arah Amandemen Undang-undang Pajak 2004*, Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 26 Oktober 2004;
- Gunadi, *Pokok-pokok Reformasi Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Investasi Dunia Usaha*, Majalah Berita Pajak, Nomor 1542/Tahun XXXII/Juli 2005;
- Hadi Poernomo, Strategi & Prklarsa Regulasi Perpajakan Nasional Dalam Menopang Omalisasi Penerimaan Negara, *Berita Pajak* Nomor 1465/Tahun XXXIV/15 April 2002;
- Harian Jawa Pos*, 6 Desember, 2004;
- Muhammad Na'im Amali, *Mencermati Perumusan Masalah Kebijakan Sunset Policy*, 2008;
- Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 1994),
- Mansury, *Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak Dan Administrasi Pajak*, Majalah Hukum Dan Pembangunan, (Jakarta ; Universitas Indonesia, 2000),
- Majalah Berita Pajak*, Nomor 1555, Tahun XXXVIII, 15 Januari 2006;
- Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro, 1997)
- Noor rahardjo, *Aspek Yuridis Sunset Policy dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Naskah disajikan dalam Seminar Nasional tentang : Sunset Policy 2008 dalam Perspektif Kepatuhan Wajib Pajak, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang 26 Nopember 2008;

Pandiangan Liberti, *"Kurang Bayar = Menunggak Pajak ? Perlu Konvergensi Terminologi"*, *Berita Pajak* No. 1401/Tahun XXXII/15 Agustus, 1999;

Tedy Iswahyudi, Reformasi Perpajakan : *Menuju Sistim Administrasi Perpajakan Yang Menopang Penerimaan Pajak*, dalam *Majalah Berita Pajak* Nomor 1536, Tahun XXXVII, Tanggal 1 April 2005;

### **C. Peraturan Perundangan-undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Surat Edaran Nomor SE-55/PJ/2008 tanggal 23 September 2008, Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpajakan.

### **D. Internet**

[www.beritapajak.go.id](http://www.beritapajak.go.id)